

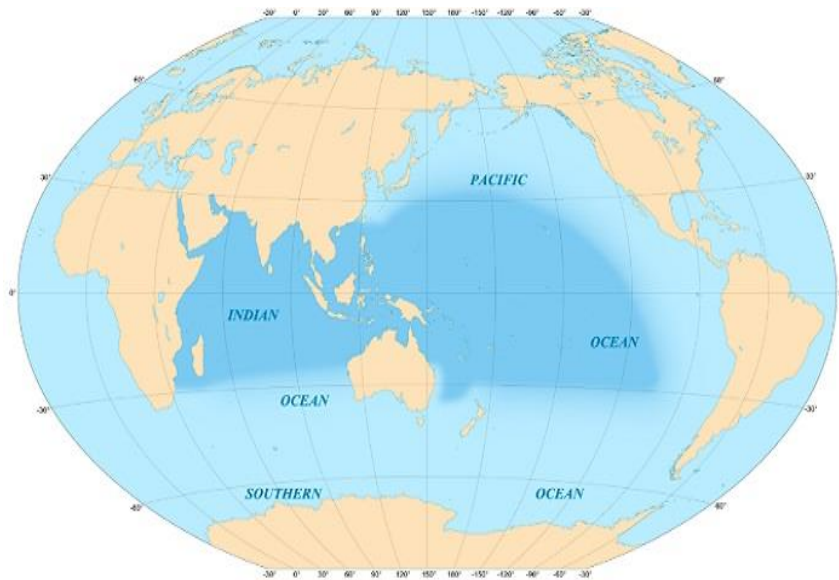
BAB IV

STRATEGI INDONESIA MEWUJUDKAN ASEAN OUTLOOK ON INDO-PACIFIC (AOIP)

4.1 Kemunculan Kawasan Indo-Pasifik

Kawasan Indo-Pasifik yang merupakan penggabungan dari wilayah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan cakupan yang sangat luas maka sangat banyak negara yang berada pada kawasan tersebut. Dari negara-negara besar hingga negara kepulauan sekalipun berada pada lingkup kawasan ini. Setidaknya ada lebih dari 50 negara yang berada pada lingkup Indo-Pasifik.

Gambar 4.1.1 Samudra Hindia dan Samudra Pasifik



Sumber: <http://theglobal-review.com/> (Diakses pada 28 April 2020)

Samudra Hindia, lautan ketiga terbesar di dunia (setelah Pasifik dan Atlantik), menempati sekitar 20 persen permukaan laut Bumi, yang meliputi

Langgeng Gilang Pangestu, 2020
STRATEGI INDONESIA MEWUJUDKAN ASEAN OUTLOOK ON INDO-PACIFIC (AOIP) UNTUK MENCIPTAKAN STABILITAS DI KAWASAN INDO-PASIFIK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

area total 73,56 juta mil persegi (Michel & Sticklor, 2012). Ia dibatasi ke utara oleh anak benua India, kemudian di sebelah barat dan barat laut dibatasi oleh pantai Afrika timur dan Semenanjung Arab, lalu di sebelah timur oleh Thailand, Semenanjung Melayu, Indonesia, dan Australia. Tingkat paling utara dari Samudra Hindia adalah pelabuhan Iran Bandar Imam Khomeini di Teluk Persia. Selain itu, Samudra Hindia meliputi beberapa laut regional dan wilayah laut: Laut Andaman, Laut Arab, Teluk Benggala, Teluk Besar Australia, Teluk Aden, Teluk Mannar, Teluk Oman, Teluk Oman, Laut Laccadive, Selat Mozambik, Teluk Persia, dan Laut Merah. Wilayah Samudra Hindia mengandung banyak mineral, minyak, dan gas alam.

Negara-negara bagian kawasan Samudra Hindia memiliki lebih dari dua pertiga cadangan minyak dunia yang diketahui. Sehingga wilayah Samudra Hindia diyakini kaya dengan cadangan energi (Albert, 2016). Setidaknya 35 persen cadangan gas dunia, 60 persen uranium, 40 persen emas, 80 persen dari semua cadangan intan, dan sejumlah besar berbagai zat mineral lainnya (Future Directions International, 2012).

Samudra Pasifik memiliki luas sekitar 63,8 juta mil persegi (165,25 juta km persegi). Samudra Pasifik jauh sangat lebih luas dibanding Samudra Hindia dan Samudra Atlantik, Selain itu luasnya lebih dari sekadar permukaan daratan bumi. Samudra Pasifik membentang dari pantai Antartika ke Selat Bering hingga 135° garis lintang, sekitar 15.600 mil (15.500 km). Luas memanjang terbesarnya adalah sekitar 19.000 mil (19.300 km) di sepanjang garis lintang 5°U, antara pantai-pantai Kolombia di Amerika Selatan dan Semenanjung Melayu di Asia. Kedalaman rata-rata adalah 14.040 kaki (4.280 meter), dan kedalaman terbesar yang diketahui adalah 36.201 kaki (11.034 meter) yakni di Palung Mariana (Cotter, Bardach, & Morgan, 2019).

Pembentukan blok perdagangan regional menyebabkan peningkatan perdagangan laut dan pengembangan produk baru. Sebagian besar negara

bagian Samudra Hindia terus mengekspor bahan mentah dan mengimpor barang-barang manufaktur yang diproduksi di tempat lain, dengan beberapa pengecualian seperti Australia, India, dan Afrika Selatan. Minyak mendominasi perdagangan, karena Samudra Hindia telah menjadi jalur penting untuk pengangkutan minyak mentah ke Eropa, Amerika Utara, dan Asia Timur. Komoditas utama lainnya termasuk besi, batu bara, karet, dan teh. Bijih besi dari negara bagian Australia Barat dan dari India dan Afrika Selatan dikirim ke Jepang, sedangkan batu bara diekspor ke Inggris dari Australia melalui Samudra Hindia. Makanan laut olahan telah muncul sebagai barang ekspor utama dari negara-negara pesisir. Selain itu, pariwisata telah menjadi semakin penting di banyak pulau (Verlaan, Morgan, & Kanayev, 2020).

Samudra Hindia menyediakan rute pelayaran internasional yang penting. Oman, Yaman, Somalia, India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, dan Indonesia adalah negara pesisir yang mengelilingi Samudra Hindia (Tertia & Perwita, *Maritime Security In Indo-Pacific: Issues, Challenges And Prospects*, 2018). Pengiriman di Samudra Hindia dapat dibagi menjadi tiga komponen: dhow, pengangkut kargo kering, dan tanker. Selama lebih dari dua milenium, kapal berlayar kecil yang disebut dhow. Perdagangan menggunakan dhow sangat penting di Samudra Hindia bagian barat, kapal-kapal itu dapat memanfaatkan angin musim. Berbagai macam produk diangkut antara pelabuhan di pantai Afrika Timur dan pelabuhan di Semenanjung Arab dan di pantai barat India (terutama Mumbai, Mangaluru (Mangalore)). Namun saat ini sebagian besar lalu lintas dhow telah digantikan oleh kapal yang lebih besar, bertenaga dan dengan transportasi darat, dan dhow yang tersisa telah dilengkapi dengan mesin bantu (Verlaan, Morgan, & Kanayev, 2020).

Banyak pengiriman kargo kering Samudra Hindia kini ditampung dalam kontainer. Sebagian besar kapal kontainer masuk dan keluar Samudera Hindia melalui Tanjung Harapan, Terusan Suez dan Laut Merah, dan Selat Malaka. Afrika Selatan dan India memiliki armada dagang sendiri, tetapi sebagian besar negara pesisir lainnya hanya memiliki beberapa kapal dagang dan bergantung pada kapal negara lain untuk mengangkut kargo mereka. Sebagian besar kargo kering lainnya diangkut oleh angkutan curah, terutama yang digunakan untuk membawa bijih besi dari India, Afrika selatan, dan Australia barat ke Jepang dan Eropa. Rute penting dari Australia barat adalah melalui Selat Sunda dan Laut China Selatan ke Jepang. Pelabuhan utama Samudra Hindia meliputi Durban (Afrika Selatan), Maputo (Mozambik), Djibouti (Djibouti), Aden (Yaman) Karachi, Mumbai, Chennai, Kolkata di anak benua India dan Kolombo di Sri Lanka, Melbourne, Port Adelaide Enfield, dan Port Hedland di Australia (Verlaan, Morgan, & Kanayev, 2020).

Lalu lintas kapal tanker bergerak terutama dari pelabuhan-pelabuhan di Teluk Persia melintasi Samudra Hindia utara ke Selat Malaka dan dari Teluk Persia ke selatan di sepanjang pantai Afrika dan di sekitar Tanjung Harapan. Rute melalui Terusan Suez menjadi kurang efektif dan mungkin tidak bisa dilalui karena ukuran tanker banyak yang melebihi kapasitas kanal (Verlaan, Morgan, & Kanayev, 2020). Oleh karena ukuran kapal tanker yang besar itu maka mereka melintasi jarak yang lebih jauh. Hal ini diperlukan untuk memindahkan minyak dari Teluk Persia ke Eropa. Kapal tanker terbesar sekarang harus menggunakan Selat Lombok melalui Kepulauan Sunda Kecil untuk membawa minyak ke Jepang, karena ukuran mereka terlalu besar untuk rute melalui selat Malaka dan Singapura.

Sedangkan di kawasan Samudra Pasifik sejak pertengahan abad ke-20, telah terjadi pertumbuhan luar biasa dalam perdagangan antara Lingkar Pasifik barat. Terutama China, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Amerika

Utara, dan tidak tertinggal Amerika Serikat. Perdagangan juga telah berkembang antara Amerika Utara dan negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Pada wilayah Pasifik barat, perdagangan meningkat antara Jepang dan Korea Selatan. Selain itu, pola perdagangan di Amerika Serikat telah bergeser, dengan negara-negara Pasifik sekarang bertanggung jawab atas sebagian besar perdagangan secara keseluruhan. Di Amerika Serikat, Los Angeles telah melampaui New York City sebagai pelabuhan dengan volume perdagangan terbesar di negara itu dalam hal nilai, dan pelabuhan terdekat Long Beach juga telah menjadi pusat utama perdagangan internasional (Cotter, Bardach, & Morgan, 2019).

Dengan demikian, Samudra Pasifik mendukung beberapa rute perdagangan paling penting di dunia. Sebagian besar ekspor bergerak dari barat ke timur dan dari utara ke selatan adalah barang-barang manufaktur bernilai tinggi. Sebaliknya, sebagian besar ekspor bergerak dari timur ke barat dan dari selatan ke utara adalah bahan baku dan manufaktur ringan (Cotter, Bardach, & Morgan, 2019).

Di luar Amerika Serikat, Jepang adalah negara perdagangan Pasifik terbesar, dan arus komoditas terpenting di Pasifik adalah ke dan dari Jepang. Impor Jepang, sebagian besar bahan baku, jauh melebihi ekspor negara itu dalam tonase. Ekspor utamanya yakni kendaraan bermotor, permesinan, dan peralatan presisi dan elektronik (Cotter, Bardach, & Morgan, 2019). Produk tersebut didistribusikan hampir di seluruh dunia, meskipun jumlah terbesar masuk ke Amerika Serikat. Menyusul di belakang Jepang adalah China, yang perdagangannya telah tumbuh secara dramatis sejak 1990-an.

Di antara negara-negara perdagangan Pasifik lainnya, Australia dan Selandia Baru pada dasarnya adalah pengeksport bahan baku, sementara Korea Selatan dan Taiwan sangat bergantung pada perdagangan dan juga pengimpor besar bahan baku. Negara-negara pulau kecil di Pasifik hanya menyumbang

sebagian kecil untuk perdagangan Pasifik secara keseluruhan, tetapi kebanyakan dari mereka sangat bergantung pada perdagangan, terutama impor bahan-bahan dasar seperti bahan makanan dan minyak bumi. Secara umum, pulau-pulau kecil adalah importir bersih dan bukan eksportir bersih, dengan hanya Papua Nugini yang mengekspor lebih banyak dari pada impornya (Cotter, Bardach, & Morgan, 2019).

Dengan semakin pentingnya Pasifik dalam perdagangan dunia, hal tersebut ikut mendorong pertumbuhan dalam kemampuan infrastruktur transportasi. Jepang, Korea Selatan, China, dan Filipina menduduki peringkat tinggi dalam kepemilikan kapal. Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan adalah negara-negara pembuat kapal utama di dunia (Cotter, Bardach, & Morgan, 2019). Selain pelabuhan Los Angeles dan Long Beach, pelabuhan utama lainnya di Pasifik timur adalah pelabuhan di Teluk San Francisco dan di wilayah Puget Sound. Di Pasifik barat, pelabuhan Jepang di Tokyo dan Teluk Osaka mendominasi perdagangan; pelabuhan utama lainnya termasuk Pusan di Korea Selatan, Shanghai dan Hong Kong di China, Kao-hsiung di Taiwan, dan Sydney di Australia. Singapura, meskipun berada di pinggir Samudra Pasifik, mendominasi lalu lintas ke dan dari Asia Tenggara dan merupakan penghubung utama antara Samudra Pasifik dan India.

4.1.1 “Evolusi” Asia Pasifik

Istilah Indo-Pasifik mungkin tampak baru bagi geopolitik, tetapi gagasan yang mendasarinya sama sekali tidak. Dalam beberapa hal Indo-Pasifik dipandang sebagai sebuah evolusi dari gagasan Asia Pasifik yang ada sejak sekitar akhir abad 20. Kawasan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik pada dasarnya sejak dahulu sudah menjadi jalur perairan tradisional interaksi antar negara yang aktif. Seperti pada awal 1400-an, kekaisaran China mengirim “*Treasure Fleet*” yang kuat yang dipimpin oleh Laksamana Zheng He dalam berbagai perjalanan ke Samudra Hindia (Medcalf,

2015). Ketertarikan China pada usaha ini tidak berkelanjutan, dan kaisar menghentikan pelayaran setelah melihat sedikit manfaat di dalamnya. Segera setelah Zheng He menghentikan ekspedisinya, sejak abad ke-15 dan seterusnya, para petualang Eropa melihat banyak sekali, dan mulai mengunjungi Samudra Hindia dan perairan serta daratan di timur dan utara. Kegiatan perusahaan perdagangan merkantilis Eropa, penjelajah, diplomat, dan ekspedisi militer.

Pasca perang dunia II, pada 1960-an Asia-Pasifik mendominasi konsepsi Asia (Medcalf, 2015). Ini umumnya dipahami sebagai wilayah yang menghubungkan Timur Laut dan Asia Tenggara dengan Oceania (dan karena itu Australia) dan Amerika. Sebagian besar tujuan gagasan ini adalah untuk mencerminkan dan memperkuat peran strategis dan ekonomi AS yang penting di Asia, serta keberhasilan negara-negara industri Asia Timur sebagai mitra dagang AS. Asia-Pasifik mencapai tingkat relevansi dan pelembagaan baru pada akhir 1980-an, dengan pembentukan proses Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC). Konsolidasinya, termasuk sebagian besar negara-negara Asia Timur dan Australia, ditambah Amerika Serikat, Kanada, dan tiga negara Amerika Latin, membantu meredakan kekhawatiran tentang penghematan AS pada akhir Perang Dingin. Pada saat China mulai terlibat dengan multilateralisme Asia pada 1990-an, ia menemukan seperangkat institusi Asia-Pasifik: tidak hanya APEC, tetapi juga ASEAN dan dialog keamanannya yang lebih luas, ASEAN Regional Forum (ARF).

Konsep Asia-Pasifik mulai goyah dengan dua faktor yang muncul pada 1990-an yaitu bangkitnya India sebagai kekuatan ekonomi dan militer yang substansial dengan kepentingan di luar Asia Selatan dan meningkatnya koneksi antara kekuatan ekonomi Asia Timur dan wilayah Samudra Hindia, terkait terutama dengan permintaan energi dan sumber daya lainnya. ARF datang untuk memasukkan India dan pemain Asia Selatan lainnya pada

pertengahan 1990-an. Pada momen puncaknya yakni pembentukan KTT Asia Timur (EAS) pada 2005. Masyarakat Asia Tenggara menerima India, Australia, dan Selandia Baru sebagai anggota dari forum para pemimpin regional. Dengan demikian era kontemporer Indo-Pasifik dimulai. Penafsiran peristiwa ini kemudian dilakukan pada tahun 2013 oleh menteri luar negeri Indonesia Marty Natalegawa, ketika ia berpendapat bahwa pembentukan EAS adalah tindakan sadar diplomasi Indo-Pasifik oleh negara-negara Asia Tenggara.

4.1.2 Gagasan Indo-Pasifik

Kawasan Indo-Pasifik merupakan pusat gravitasi keamanan global, kawasan ini merupakan kawasan paling strategis di dunia. Keamanan Internasional secara umum sangat ditentukan oleh bagaimana dinamika dan interaksi keamanan di kawasan ini. Kawasan Indo-Pasifik juga merupakan kawasan yang paling dinamis pertumbuhan ekonominya. Posisi strategis tersebut menjadikan Indo-Pasifik menjadi pusat aktivitas yang penting dalam percaturan politik global. Posisi strategis tersebut tentu akan mengakibatkan konstelasi konflik serta kerja sama yang tidak hanya melibatkan negara di kawasan tetapi juga melibatkan *great power* dan *middle power* di luar kawasan. Mengikuti pendapat Bantarto Bandoro dimana lingkungan strategis dapat dipantau melalui dimensi politik, sosial, keamanan, teknologi dan ekonomi. Dengan seperti itu kawasan Indo-Pasifik sudah memenuhi hal tersebut.

Gambar 4.1.2.1 Capt. Dr. Gurpreet S. Khurana



Sumber: <https://independent.academia.edu/khurana> (diakses pada 25-01-2020)

Kawasan Indo-Pasifik tidak terbentuk dengan sendirinya. Konsep ini pertama kali dicetuskan oleh Gurpreet S. Khurana tahun 2007, seorang direktur eksekutif dari *National Maritime Foundation* di India dan pernah menjadi Kapten Angkatan Laut India, dalam artikelnya yang berjudul “*Security of Sea Lines: Prospect for India-Japan Cooperation*”(Kuo, 2018). Istilah Indo-Pasifik berawal dari konsep geografis yang berpadu dengan pandangan ekonomi. Dengan keberadaan peluang geo-ekonomi yang luar

Langgeng Gilang Pangestu, 2020

STRATEGI INDONESIA MEWUJUDKAN ASEAN OUTLOOK ON INDO-PACIFIC (AOIP) UNTUK MENCIPTAKAN STABILITAS DI KAWASAN INDO-PASIFIK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

biasa serta tantangan keamanan yang krusial. Dimana tidak hanya untuk Asia, tetapi juga untuk seluruh dunia. Maka kemudian terbangun suatu konstruksi kawasan tunggal yakni Indo-Pasifik. Gambaran tersebut untuk menjelaskan penggabungan wilayah Samudera Hindia dan wilayah Pasifik Barat termasuk laut yang berdekatan di Asia Timur dan Asia Tenggara ke dalam konstruksi regional tunggal (Khurana, 2017). Kemudian lekat kaitannya Indo-Pasifik digunakan dalam konteks ungkapan geopolitik.

Dasar penting lain dari gagasan Indo-Pasifik adalah tumbuhnya keunggulan India. Kebangkitan kekuatan India di awal abad 21 menjadi salah satu pemicu Khurana dalam mencetuskan istilah Indo-Pasifik. Di tahun 1990an, India mengalami pertumbuhan ekonomi yang impresif dan cukup signifikan. Titik awal yakni peningkatankerja sama AS-India di bidang ekonomi perdagangan maupun keamanan dan pertahanan (Iriawan, Diskursus Indo-Pasifik: Hegemoni Amerika, Persaingan Strategis, Hingga Transformasi Geopolitik Kawasan, 2018). Hal ini menjadikan India dan Samudera Hindia tidak lagi dikesampingkan dalam geopolitik Asia. Meskipun "Indo" dalam "Indo-Pasifik" mewakili Samudra Hindia dan bukan India. Khurana mengharapkan India untuk memainkan peran utama, termasuk dalam hal memastikan lingkungan maritim yang kondusif untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Hal ini terhambat pada saat itu karena konstruk pandangan menggunakan ungkapan "Asia-Pasifik" sehingga tidak memadai dan ambigu dalam hal menggabungkan India dalam urusan kawasan.

Alasan lain munculnya istilah Indo-Pasifik dilatarbelakangi oleh konteks meningkatnya ketegasan politik-militer China sehingga mengakibatkan peningkatan hubungan antara India dan Jepang sejak tahun 2006. Pada tahun 2006, India dan Jepang mulai berbagi penilaian strategis. India dan Jepang melihat China akan memperluas pengaruhnya ke kawasan Samudera Hindia, terlebih kerentanan strategis utama China, yaitu,

jalur kehidupan energinya yang melintasi Samudra Hindia. Gagasan "Indo-Pasifik" adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan Angkatan Laut India untuk memoderasi perilaku China, dengan demikian dapat menghalangi agresivitas masa depannya. Oleh sebab itu telah disadari bahwa kawasan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik sangat penting dan harus diperhatikan menjadi satu-kesatuan. Namun Khurana meluruskan walaupun istilah Indo-Pasifik tidak dapat dipisahkan kaitannya dengan China, tetapi Indo-Pasifik tidak dapat diartikan seutuhnya sebagai upaya untuk mengimbangi, mengisolasi atau membendung pengaruh China. Karena pada dasarnya Istilah Indo-Pasifik lebih merepresentasikan kawasan yang menjadi 'inti maritim' di Asia, dimana negara-negara membangun kekuatan laut dan mengembangkan kerja sama maritim guna memanfaatkan hasilnya bersama-sama (Kuo, 2018).

Masing-masing negara memiliki pemaknaan sendiri untuk menggambarkan kawasan Indo-Pasifik. Pemaknaan kawasan yang populer disebut Indo-Pasifik ini oleh masing-masing negara ditentukan berdasarkan pemikiran terkait kepentingan negara, cakupan geografis serta penerapan praktik strategisnya. Kawasan Indo-Pasifik meliputi negara-negara besar (*great powers*) dan sejumlah negara sedang (*middle powers*). Keberadaan sejumlah negara besar dan sedang ini membuat perairan di Indo-Pasifik tidak saja menjadi perairan dengan lalu lintas pelayaran tersibuk di dunia, namun juga menjadi muara konflik kepentingan kekuatan besar (Montratama, 2016).

Ekonomi merupakan aspek penting yang dipengaruhi dengan adanya Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Setidaknya keberadaan dua samudra tersebut dijadikan sebagai jalur perdagangan antar negara sehingga meningkatkan taraf ekonomi. Selain itu banyaknya negara yang ada pada lingkup kawasan ini, memastikan banyaknya hubungan timbal balik antar negara yang saling membutuhkan.

Indo-Pasifik menyumbang dua pertiga dari pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) karena Indo-Pasifik menyumbang setidaknya 60 persen dari GDP global(The Department of Defense USA, 2019). Wilayah ini mencakup ekonomi terbesar dunia yakni Amerika Serikat, China, dan Jepang. Selain itu terdapat enam negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia antaranya yaitu India, Kamboja, Laos, Myanmar, Nepal, dan Filipina.

Tabel 4.1.2.1 *Gross domestic product*

Gross domestic product 2018

Urutan	Negara	GDP (millions of US Dollars)
1.	Amerika Serikat	20,544,343
2.	China	13,608,152
3.	Jepang	4,971,323
4.	India	2,718,732
5.	Kanada	1,713,342
6.	Rusia	1,657,555
7.	Korea Selatan	1,619,424
8.	Australia	1,433,904
9.	Meksiko	1,220,699
10.	Indonesia	1,042,173

<https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators>

4.1.3 Kapabilitas Militer Negara Kawasan Indo-Pasifik

Militer menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh masing-masing negara. Kepemilikan militer yang baik akan menjadi daya jual atau

daya saing untuk mempertahankan kedaulatan serta pengakuan dari negara lain. Kekuatan militer salah satu faktor penting dalam kehidupan bernegara, terlebih di lingkup Kawasan Indo-Pasifik terdapat negara-negara *Great Power* yang saling berebut dalam memberikan pengaruh di kawasan. Oleh karenanya masing-masing negara memastikan untuk memperkuat kapabilitas militer, dari anggaran hingga kemampuan alat utama sistem pertahanan (alutsista).

Indo-Pasifik akan tetap menjadi wilayah yang paling termiliterisasi di dunia pada tahun 2020(Gady, 2019). Dua pembelanjaan militer global terbesar yakni Amerika Serikat dan China akan terus bertanggung jawab atas sejumlah besar pengeluaran pertahanan regional pada tahun 2020. Dalam konteks persaingan kekuatan besar ini, pemerintah China masih berharap untuk mempertahankan hubungan militer yang baik dengan Amerika Serikat(Xiaobo, 2020). Hal ini diindikasikan dari masih usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip non-konflik, non-konfrontasi, saling menghormati, dan kerja sama saling menguntungkan. Tujuannya untuk membuat hubungan antar militer menjadi stabilisator hubungan keseluruhan antara kedua negara. Pemerintah AS menyetujui peran stabilisasi yang harus dimainkan oleh hubungan masing-masing militer. Selain itu negara Indo-Pasifik lainnya juga akan menghabiskan banyak uang untuk perangkat keras militer baru selama dua belas bulan ke depan. Semua negara besar Indo-Pasifik saat ini sedang mengejar program akuisisi militer dengan biaya besar(Gady, 2019).

NO	Negara	Personnel	Financials (USD)	Air Power				Land Forces					Naval Forces					
				Fighter	Transport	Trainers	Helicopters	Tanks	Armored Vehicles	Self-Propelled Artillery	Towed Artillery	Rocket Projectors	Aircraft Carriers	Destroyers	Frigates	Corvettes	Submarines	Patrol
1	Amerika Serikat	2.260.000	750.000.000.000	2.085	945	2.643	5.768	6.289	39.253	1.465	2.740	1.366	20	91	0	19	66	13
2	Rusia	3.013.628	48.000.000.000	873	424	497	1.522	12.950	27.038	6.083	4.465	3.860	1	16	10	79	62	41
3	China	2.693.000	237.000.000.000	1.232	224	314	911	3.500	33.000	3.800	3.600	2.650	2	36	52	50	74	220
4	India	3.544.000	61.000.000.000	538	250	359	722	4.292	8.686	235	4.060	266	1	10	13	19	16	139
5	Jepang	303.160	49.000.000.000	279	60	427	637	1.004	3.130	238	500	99	4	40	0	6	20	6
6	Korea Selatan	3.680.000	44.000.000.000	414	41	298	803	2.641	14.000	3.040	3.854	575	2	12	18	12	22	111
7	Mesir	920.000	11.200.000.000	215	59	387	294	4.295	11.700	1.139	2.189	1.084	2	0	7	7	8	45
8	Iran	873.000	19.600.000.000	155	62	94	100	2.056	4.300	570	2.088	1.935	0	0	7	3	34	342
9	Pakistan	1.204.000	11.400.000.000	356	49	513	346	2.300	7.330	429	1.226	100	0	0	9	2	8	12
10	Indonesia	800.000	7.600.000.000	41	54	109	177	313	1.178	153	366	36	0	0	7	24	5	156

Tabel 4.1.3.1 Kekuatan Militer 2020. 2020 Military Strength Ranking. <https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp>

Langgeng Gilang Pangestu, 2020

STRATEGI INDONESIA MEWUJUDKAN ASEAN OUTLOOK ON INDO-PACIFIC (AOIP) UNTUK MENCIPTAKAN STABILITAS DI KAWASAN INDO-PASIFIK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

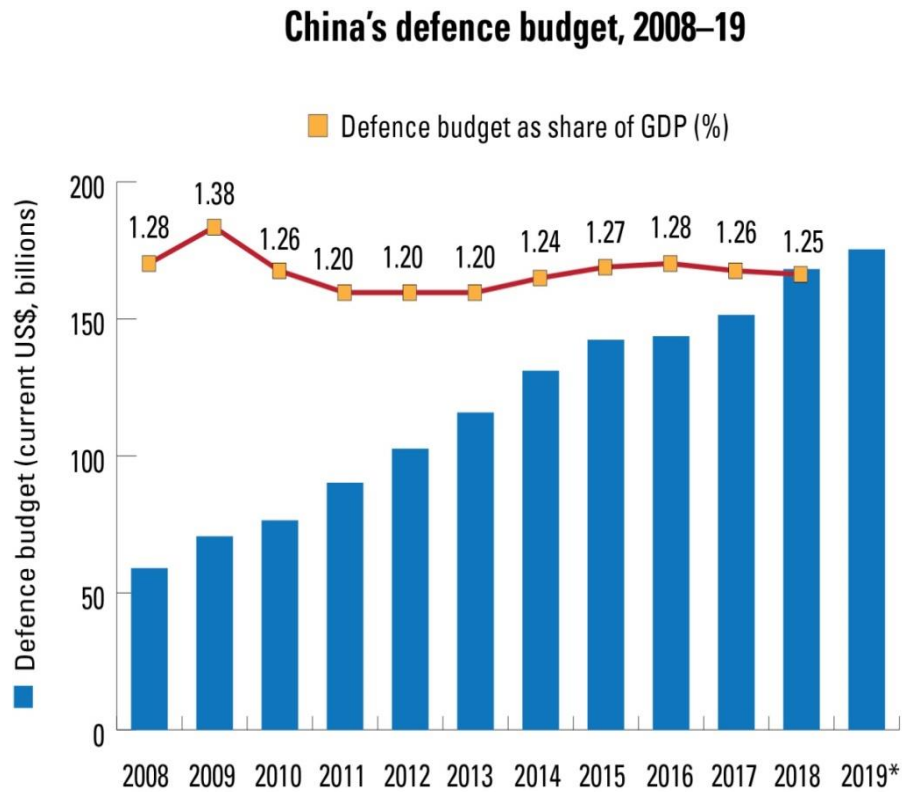
4.1.4 Rivalitas Antara China dengan Amerika Serikat (Quadrilateral)

Peningkatan pengaruh China, semakin tak terelakkan, China telah menjadi pusat gravitasi baru di kawasan. Selain mempunyai ambisi yang sangat besar, China juga didukung oleh kekuatan ekonomi. Perhatian China ke Pasifik Selatan semakin meningkat dan intensif. Niat jangka pendek China terhadap negara-negara di pinggirannya, termasuk di Asia Timur Laut dan Asia Tenggara, diartikulasikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Komunis China Xi Jinping pada konferensi kerja besar tentang diplomasi pinggirannya yang diadakan 24-25 Oktober 2013 di Beijing (Glaser, 2014). Xi menegaskan kembali bahwa periode yang diperpanjang hingga 2020 adalah "periode peluang strategis" untuk pertumbuhan dan perkembangan China. Selama masa ini, China perlu mempertahankan lingkungan eksternal yang stabil yang kondusif bagi reformasi dan pertumbuhan ekonomi domestik. Untuk mencapai tujuan ini, kata Xi, China harus berusaha untuk membuat tetangga China "lebih ramah dalam politik, secara ekonomi lebih dekat dengan kita, dan memiliki kerja sama keamanan yang lebih dalam dan ikatan antar-orang yang lebih dekat." Negara-negara tetangga harus diperlakukan sebagai teman dan mitra, tambahnya. China seharusnya membuat mereka merasa aman dan membantu mereka untuk berkembang (Glaser, 2014).

Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan bantuan ekonomi yang diberikan China kepada negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengannya. China, juga tercatat sebagai pendonor peringkat ketiga setelah Australia dan AS, juga menawarkan berbagai paket bantuan keuangan yang bertujuan untuk memperkuat perdagangan, membangun infrastruktur, meningkatkan kemampuan pemerintah dan militer, serta mengembangkan sumberdaya alam (Dugis, 2015). Saat ini terdapat tiga tujuan Keamanan Inti China di Asia, China sedang mengejar tiga tujuan inti keamanan di Asia Timur: melakukan kontrol atas "laut dekat;" mempromosikan integrasi ekonomi regional yang berpusat di China dan membela serta memajukan

klaim kedaulatan China (Glaser, 2014). Beijing berupaya mencapai tujuan-tujuan ini sambil mempertahankan hubungan baik dengan sebagian besar tetangganya di Asia Timur dan menghindari konfrontasi dengan Amerika Serikat.

Gambar 4.1.4.1 China's Defence Budget



*PRC announced defence budget 2019

© IISS

Source: IISS Military Balance+
China's defense budget, 2008-2019

Sumber: <https://www.iiss.org/blogs/military-balance/2019/05/china-defence-spending>

Program modernisasi militer China terus berlanjut, dengan belanja pertahanan yang terus meningkat selama 24 tahun berturut-turut, menjadikan China pembelanja pertahanan terbesar kedua setelah Amerika Serikat. China

menghabiskan sekitar \$175,4 miliar untuk pertahanan pada tahun 2019, dengan dana untuk personil, pelatihan, dan pengadaan. Peningkatan sumber daya dan upaya telah menghasilkan kehadiran dan kegiatan *People's Liberation Army* (PLA) yang lebih sering, canggih, dan beragam di wilayahnya(Mastro, 2019).

Modernisasi militer China difokuskan pada peningkatan kapasitas *People's Liberation Army* (PLA) untuk melakukan operasi militer regional, termasuk apa yang disebut China sebagai operasi kontra-intervensi. Ini merujuk pada rantai kemampuan dan misi yang ditujukan untuk mencegah pasukan asing, terutama AS, ikut campur dalam konflik di laut dekat China, yang meliputi Laut China Timur, Laut China Selatan, dan Laut Kuning. Untuk mendukung strategi kontra-intervensi ini, China telah mengembangkan sejumlah senjata anti akses / penolakan wilayah termasuk rudal balistik jangka pendek dan menengah, rudal jelajah darat dan udara, rudal balistik anti-kapal, canggih pesawat tempur dengan kemampuan serangan presisi, kemampuan pengisian bahan bakar udara, sistem peringatan dini di udara, dan sistem pertahanan udara terintegrasi. Prioritas utama Beijing adalah untuk mencegah atau memperlambat intervensi AS(Glaser, 2014).

Salah satu inisiatif yang menarik perhatian dunia internasional adalah *Belt and Road Initiative* (BRI) pada tahun 2013. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden China Xi Jinping selama kunjungannya ke Kazakhstan dan Indonesia pada 2013. *One Belt One Road* (OBOR) bertujuan untuk mempromosikan aliran kegiatan ekonomi yang teratur dan bebas, alokasi sumber daya yang sangat efisien dan integrasi pasar yang mendalam, mendorong negara-negara untuk mencapai koordinasi kebijakan ekonomi dan melakukan kerja sama regional yang lebih luas serta lebih mendalam dengan standar yang lebih tinggi. Kemudian bersama-sama menciptakan arsitektur kerja sama ekonomi regional yang terbuka, inklusif, dan seimbang yang

menguntungkan semua pihak. Visi dari *One Belt One Road Initiative* adalah untuk mewujudkan "*Five Link*", yang merujuk pada koordinasi kebijakan, infrastruktur, perdagangan, keuangan, dan manusia (Fung Business Intelligence Centre, 2015). BRI terdiri dari 2 komponen utama yaitu *the Silk Road Economic Belt* dan *the 21st Century Maritime Silk Road* (Anam & Ristiyani, 2018).

Gambar 4.1.4.2 Jalur BRI (*Belt and Road Initiative*)

Geographic Coverage of the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road



Source: Compiled by the Fung Business Intelligence Centre based on the FRAMEWORK chapter of the "Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road"

Sumber: Compiled by the Fung Business Intelligence Centre based on the FRAMEWORK chapter of the "Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road" (2015).

Silk Road Economic Belt merujuk kepada Jalur Sutra kuno yang berfungsi sebagai jalur aktivitas perdagangan dan pertukaran budaya

sepanjang 10.000 km mulai dari China hingga ke Roma(Kurniawan, 2016). *Silk Road Economic Belt* sebagai jalur darat bertujuan menghubungkan provinsi tertinggal bagian barat China dengan Eropa. Dengan cara meningkatkan kerja sama ekonomi China dengan negara-negara di kawasan Asia Tengah. Sehingga jalurnya melalui Asia tengah hingga mencapai eropa.

Sedangkan *the 21st Century Maritime Silk Road* sebagai rute laut. Jalur perdagangan maritim melewati berbagai macam perairan dunia. Selain itu *the 21st Century Maritime Silk Road* bertujuan untuk memperbaiki hubungan China dengan negara-negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara dengan menekankan pada kerja sama di bidang keamanan jalur perdagangan maritim. Kemudian inisiatif *the 21st Century Maritime Silk Road* bertujuan untuk menetralsisir persepsi negatif negara-negara Asia Tenggara dan Asia Selatan terhadap China dengan menekankan pada kerja sama ekonomi yang meliputi kerja sama keuangan, proyek pembangunan infrastruktur (seperti pembangunan jalan dan rel kereta api), dan upaya meningkatkan kerja sama di bidang keamanan(Kurniawan, 2016). Ide tentang *the 21st Century Maritime Silk Road* juga memberi penekanan pada pentingnya aspek maritim dari peningkatan kerja sama China dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan melalui penguatan ekonomi maritim dan kerja sama teknis dan ilmiah di bidang lingkungan hidup.

Kemudian di tahun 2017 merupakan tahun yang menarik dalam perkembangan wacana Indo-Pasifik, hal tersebut dikarenakan AS sebagai negara adidaya dan negara-negara besar di kawasan mengadopsi konsep Indo-Pasifik serta menghidupkan kembali “Quad”. Kerangka kerja sama segi empat yang meliputi Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat dihidupkan kembali pada 2017 setelah pembekuan selama sekitar sepuluh tahun(Hanada, 2018). Pada bulan April 2017, Kementerian Luar Negeri Jepang merilis “*Free and Open Indo-Pacific Strategy*” (MoFA Strategy) yang menggambarkan

bagaimana Tokyo akan memperluas pandangan dunia dan peran strategisnya di bawah era Shinzo Abe yang ditentukan oleh keinginan untuk membuat “*proactive contribution to peace*”(Lee, 2018). Salah satu prioritas kebijakan Kerja Sama Pembangunan Jepang adalah mempromosikan kerja sama pembangunan strategis melalui FOIP dalam rangka mewujudkan stabilitas dan kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik.

Sekitar tujuh bulan kemudian pada bulan November 2017, Australia mengeluarkan *2017 Foreign Policy White Paper*(Hanada, 2018). Di dalam Buku Putih Kebijakan Luar Negeri 2017 tersebut terdapat lima tujuan yang sangat penting bagi keamanan dan kemakmuran Australia, salah satunya yaitu “*promote an open, inclusive and prosperous Indo–Pacific region in which the rights of all states are respected*” (Australian Government, 2017). Kepentingan Australia didasari karena distribusi kekuasaan saat ini di Indo-Pasifik sedang mengalami pergeseran. Indo-Pasifik merupakan wilayah yang berisi mitra ekonomi yang paling penting dan dinamis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Australia. Sehingga hal yang paling diinginkan dan diharapkan yakni kondisi lingkungan yang patuh terhadap aturan, tidak dibatasi oleh penggunaan kekuatan koersif. Karena dengan begitu dapat memberikan perdamaian abadi, dimana hak semua negara dihormati, dan dapat memfasilitasi pasar terbuka yang meberikan aliran bebas terhadap perdagangan, dan modal.

Pada bulan Desember 2017, Gedung Putih merilis *The National Security Strategy of the United States of America* (NSS)(White House, 2017).Dalam NSS terdapat tujuan dasar yang harus dilakukan oleh AS. Pertama, tanggung jawab mendasar negara adalah melindungi rakyat dan tanah air AS. Kedua, berupaya untuk menciptakan kemakmuran bagi AS. Ketiga, menjaga perdamaian melalui kekuatan dengan membangun kembali

militer sehingga tetap unggul, dan dapat menghalangi musuh sehingga mampu bertarung dan menang. Keempat, memajukan pengaruh AS dimata dunia.

NSS mengidentifikasi China dan Rusia sebagai upaya untuk "menantang kekuatan, pengaruh, dan kepentingan AS" sambil berusaha untuk "mengikis keamanan dan kemakmuran AS". China dan Rusia ingin membentuk dunia yang bertentangan dengan nilai atau kepentingan AS(White House, 2017). Rusia berupaya memulihkan status kekuatan besarnya dan membangun wilayah pengaruhnya di dekat perbatasannya. Sedangkan China berupaya untuk menggusur Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik, kemudian sedang memperluas pengaruh model ekonomi yang menjadi kepentingannya, dan membentuk wilayah Indo-Pasifik sesuai keinginannya. Investasi infrastruktur dan strategi perdagangan China memperkuat aspirasi geopolitiknya. Kemudian membangun dan memiliterisasi Laut China Selatan membahayakan arus perdagangan bebas, mengancam kedaulatan negara lain, dan mengacaukan stabilitas regional. Modernisasi militer yang dilakukan China juga dinilai dapat membatasi akses AS ke kawasan Indo-Pasifik.

Bagi sekutu dan mitra AS sangat penting untuk menanggapi ancaman bersamadan menjaga kepentingan bersama di kawasan Indo-Pasifik. AS menyambut kemunculan India sebagai kekuatan global terkemuka dan mitra strategis. Sehingga untuk menanggapi hal tersebut AS akan berupaya meningkatkan *Quadrilateral* atau kerja sama segi empat dengan Jepang, Australia, dan India(White House, 2017).

Quadrilateral pada awalnya lahir dari bencana alam tsunami Samudra Hindia pada Desember 2004. Salah satu tanggapannya dari “*Tsunami Core Group*” yang didirikan oleh AS, Jepang, Australia, dan India untuk memfasilitasi koordinasi kegiatan bantuan(Envall, 2019). Empat militer negara itu terlibat bersama dalam bantuan kemanusiaan dan operasi bantuan bencana *Tsunami Boxing Day* Samudera Hindia. Kelompok ini dimaksudkan

untuk mengatasi tantangan langsung yang ditimbulkan dan akibatkan oleh tsunami, karenanya perkumpulan ini tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi permanen. Tetapi ide segi empat segera berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Jepang sangat tertarik untuk membangun koneksi berbasis nilai untuk menciptakan “*arc of freedom and prosperity*” melalui wilayah tersebut(Hanada, 2018).

Tetapi titik balik untuk perwujudan Quad adalah 2006. Quad, yang arsitek aslinya adalah Perdana Menteri Shinzo Abe, didirikan berdasarkan konsep perdamaian demokratis. Lalu para pejabat senior dari Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat ini mengadakan pertemuan perdananya 25 Mei disela-sela pertemuan Forum Regional ASEAN (ARF) di Manila untuk membahas cara-cara untuk memajukan hubungan empat kekuatan.(Chellaney, 2007)

Pada tahun 2007 terjadi hal yang positif dan juga terjadi negatif bagi perkembangan *Quadrilateral* saat itu. Hal yang positif adalah berlangsungnya latihan Malabar 2007-02 dimana keempat negara plus angkatan laut Singapura melakukan latihan angkatan laut di Teluk Benggala. Latihan Malabar 07-2 dirancang untuk meningkatkan kemampuan beroperasi di antara pasukan maritim India, Australia, Jepang, Singapura, dan AS untuk mengembangkan pemahaman dan prosedur bersama untuk operasi maritim(U.S. 7th Fleet Public Affairs, 2007). Sedangkan hal negatifnya yaitu keputusan dari Perdana Menteri Australia Kevin Rudd untuk menarik diri dari format segi empat. Peristiwa ini dipandang sebagai pengkhianatan oleh para ahli India, dan melemahkan momentum untuk kerja sama Quad. Keputusan Rudd diyakini didasarkan pada kritik keras Cina terhadap Quad, dan Rudd juga memutuskan untuk berhenti memasok uranium ke India, yang memicu persepsi bahwa Australia memprioritaskan hubungannya dengan China di atas Quad. Perkembangan itu dikombinasikan dengan perubahan administrasi di

Tokyo dari Abe ke Yasuo Fukuda. Ditambah kurangnya antusiasme di Delhi dan Washington menyebabkan penurunan kerja bagi Quad yang kemudian menjadikan kevakuman(Hanada, 2018).

Quad kembali diaktifkan setelah sepuluh tahun vakum pada November 2017. Di sela-sela KTT Asia Timur November 2017 di Manila, Filipina, para pejabat dari Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia bertemu untuk membangun kembali dan mengkonseptualisasikan ulang Dialog Keamanan *Quadrilateral*. Pertemuan Quad pertama pada 12 November 2017, membahas tujuh tema inti: tatanan berbasis peraturan di Asia, kebebasan navigasi dan penerbangan berlebih di commons maritim, penghormatan terhadap hukum internasional, peningkatan konektivitas, keamanan maritim, ancaman Korea Utara dan nonproliferasi, dan terorisme(Shearer & Gale, 2018). Namun dalam pembahasan dalam pertemuan tersebut banyak terjadi ketidaksepakatan beberapa hal dan banyak perbedaan persepsi. Tetapi mereka menggarisbawahi bahwa geografi strategis, persepsi ancaman, dan dinamika China.

Investasi yang dilakukan oleh China, Amerika Serikat, Jepang, Australia dan India di wilayah Indo-Pasifik bukan terjadi baru-baru ini. Melainkan keterlibatan investasi mereka sudah lama mempengaruhi wilayah ini. Secara global AS bisa dibilang memiliki pengaruh besar dalam investasi langsung asing baik dari saham maupun aliran masuk dan keluar. Sedangkan China berada diperingkat 2 atau 3 dibawah investasi dari AS. Namun terjadi pergerakan investasi yang melihatkan peningkatan kompetisi diantara China dengan AS. Ini adalah perbandingan lingkup investasi secara kasar.

Gambar 4.1.4.3 Ketergantungan Perdagangan Luar Negeri Dari Kawasan Indo-Pasifik Pada Lima Negara Pada 1995-2016

Country/year	1995 (%)	2000 (%)	2005 (%)	2010 (%)	2015 (%)	2016 (%)
<i>Foreign trade dependence of ASEAN's GDP on the five countries</i>						
China	2.90	6.34	13.62	14.81	19.28	17.70
The U.S.	14.80	22.30	15.99	9.23	9.48	9.33
Japan	17.97	20.54	15.48	10.82	7.88	7.36
Australia	1.81	3.02	3.61	2.97	2.15	1.94
India	0.86	1.51	2.84	2.92	2.84	2.56
<i>Foreign trade dependence of SAARC's GDP on the five countries</i>						
China	0.64	0.94	2.59	3.96	4.08	3.83
The U.S.	3.02	3.86	3.75	3.20	3.13	2.99
Japan	1.73	1.23	0.94	0.93	0.70	0.66
Australia	0.33	0.38	0.70	0.92	0.51	0.47
India ^a	1.41	1.53	3.39	3.47	3.42	3.12
<i>Foreign trade dependence of GDP of GCC (Iraq and Iran) on the five countries</i>						
China	1.01	2.68	4.72	7.53	9.79	8.37
The U.S.	5.72	7.33	7.10	4.98	4.83	4.52
Japan	9.71	11.07	10.64	7.98	4.04	4.09
Australia	0.47	0.88	0.58	0.49	0.43	0.39
India	1.88	2.03	3.15	6.86	6.00	5.79
<i>Foreign trade dependence of COMESA's GDP on the five countries</i>						
China	0.57	1.21	3.55	6.18	5.84	5.34
The U.S.	3.05	2.86	3.88	2.87	1.69	1.38
Japan	1.52	1.05	1.51	0.93	0.53	0.45
Australia	0.11	0.28	0.26	0.25	0.11	0.09
India	0.63	0.60	1.19	1.72	1.77	1.57

Sumber: Annual Report on the Development of the Indian Ocean Region (2018). Indo-Pacific: Concept Definition and Strategic Implementation. <https://books.google.co.id/>

Menurut Owen Jacobs mengungkapkan lingkungan strategis memiliki sifat VUCA, yaitu berubah-ubah (*volatility*), penuh dengan ketidakpastian (*uncertainty*), sangat kompleks (*complexity*), dan ambigu (*ambiguity*). Apa yang terjadi di Indo-Pasifik saat ini sesuai dengan pendapat tersebut. kondisi Indo-Pasifik sebagai lingkungan strategis saat ini begitu cepat berubah-ubah. Sehingga melahirkan sebuah situasi dimana ketidak adanya kepastian, seperti ketidakpastian keamanan atau stabilitas di Indo-Pasifik. Hal tersebut didukung

oleh kompleksitas hubungan antar negara dalam kawasan. dimana negara-negara yang ada sangat berjumlah banyak sehingga kerumitan hubungan antar negara semakin mempersulit negara untuk membuat Perencanaan dan pengambilan keputusan sehingga banyak keputusan yang bersifat ambigu.

4.2 Indonesia dan Indo-Pasifik

4.2.1 Prinsip Bebas-Aktif Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang harus dicapai. Kepentingan nasional dapat dicapai dalam wilayah negara itu sendiri dan dapat pula dicapai di luar wilayah negara. Dalam hal pencapaian kepentingan nasional dilakukan di luar batas wilayah negara, instrument yang digunakan ialah Politik Luar Negeri(Windiani, 2010). Cepat atau lambatnya pembangunan pada suatu negara salah satunya ditentukan oleh kondisi politik yang ada pada negara tersebut. Baik situasi politik yang terjadi di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dua-duanya memegang peranan penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Prinsip yang digunakan politik luar negeri Indonesia yakni dikenal dengan Politik bebas-aktif.

Prinsip bebas-aktif merupakan doktrin dasar dalam melihat kebijakan luar negeri Indonesia yang telah digunakan setelah Indonesia meraih kemerdekaannya. Mohammad Hatta menjadi tokoh yang pertama kali mengeluarkan kerangka kebijakan luar negeribebas-aktif dalam pidatonya yang berjudul “Mendayung Antara Dua Karang” di Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 2 September 1948.

Politik luar negeri Indonesia harus aktif bukan sesuatu yang diharapkan sikap dan tindakan yang pasif. Indonesia harus dapat menjadi subyek yang dapat menentukan kebijakannya sendiri. Aktif di sini adalah suatu kegiatan yang membentuk Indonesia untuk turut serta dalam kegiatan-kegiatan internasional yang menuju kepada terbentuknya ketertiban dunia.

Dimana hal tersebut memiliki tiga unsur dasar yaitu kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sedangkan bebas yaitu bebas mengadakan hubungan dengan negara manapun dalam arti bebas menentukan sendiri sikap dan keputusan-keputusan terhadap masalah-masalah internasional menurut nilai dan manfaatnya masing-masing tanpa mengikatkan diri kepada suatu blok. Prinsip bebas dan aktif dipilih untuk menolak tuntutan sayap kiri Uni Soviet dan di sisi lain Amerika Serikat (AS). Sikap bebas dan aktif ini juga mendefinisikan peranan yang tepat bagi Indonesia dalam konflik antara dua negara adi kuasa tersebut.

Landasan Politik Luar Negeri Indonesia dibagi menjadi tiga kategori (Indrawati & Nugroho, 2019), yaitu pertama, landasan Ideologi yang dalam hal ini adalah Pancasila. Kemudian yang kedua, Landasan Konstitusional yaitu Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Pembukaan UUD 1945 memperjelas UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Lalu yang ketiga, adalah landasan operasional. Landasan operasional berkenaan dengan bagaimana landasan dan prinsip Politik Luar Negeri dapat diwujudkan sebagai realisasi dari sifatnya yang idealis menjadi normatif yang dituangkan ke dalam bentuk ketentuan atau Undang-Undang. Perwujudannya sendiri akan berubah-ubah tergantung pada periode pemerintahan yang berkuasa sesuai dengan kepentingan nasional yang ingin dicapai pada masa tersebut.

Sehingga ketika pemerintah ingin membuat kebijakan luar negeri memiliki beberapa dasar yakni kebijakan luar negeri Indonesia harus berlandaskan ideologi Pancasila. Kedua, kebijakan luar negeri harus bertujuan untuk mengamankan kepentingan nasional sesuai Konstitusi. Ketiga, untuk meraih kepentingan nasional harus melalui kebijakan yang bebas tidak dipengaruhi atau independen. Keempat, kebijakan luar negeri Indonesia harus diselenggarakan secara pragmatis, yang berarti harus disesuaikan dengan situasi dan kenyataan yang dihadapi. Dengan begitu hal ini sejalan dengan

pendapat Fred A. Sondermann yang menjelaskan bahwa kepentingan nasional berkaitan dengan hal-hal yang ada di dalam kebijakan luar negeri, yang nantinya akan menjadi sikap oleh negara tersebut dalam menyikapi suatu isu internasional(Sondermann, 1960).

Prinsip bebas-aktif dapat menggambarkan bagaimana strategi Indo-Pasifik Indonesia terbentuk, penting untuk mengetahui bagaimana pola Indonesia dalam mengelola hubungannya dengan negara-negara yang berkekuatan lebih besar. Hal ini penting untuk diketahui, mengingat konsep Indo-Pasifik muncul di tengah kompetisi kepentingan strategis negara-negara yang berkekuatan lebih besar dari Indonesia, terutama sarat dengan rivalitas antara AS dan China. Sehingga, kebijakan luar negeri yang akan dilakukan di Indo-Pasifik tidak akan lepas dari hubungan kompleks Indonesia dengan AS dan China. Prinsip kebijakan luar negeri bebas-aktif yang telah dicetuskan Hatta pasca Perang Dunia II masih menjadi landasan utama Indonesia dalam mengelola hubungan dengan negara-negara yang berkekuatan lebih besar. Dengan berpedoman pada prinsip ini, Indonesia tidak akan memihak dalam setiap rivalitas antara great powers, termasuk antara AS dan China di Indo-Pasifik.

4.2.2 *Dynamic Equilibrium dan Indo-Pacific Treaty*

Pada subbab ini, penulis akan memaparkan bahwa Indonesia sebenarnya sudah memahami pergeseran lingkungan strategis sejak masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Isu rivalitas serta keseimbangan di dalam wilayah antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik sudah ditangkap oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa. Sehingga dengan prinsip politik bebas-aktif yang sudah dibahas sebelumnya, Indonesia berusaha memainkan peran netral dan berusaha membangun kondisi yang seimbang dan aman. *Dynamic Equilibrium*

merupakan doktrin yang digunakan untuk mengatasi dinamikasituasi pada kawasan. Namun saat itu penerapannya belum berjalan dengan cukup lancar.

Di masa pemerintahan SBY, Indonesia memulai menaruh perhatian terhadap konsep Indo-Pasifik. Di bawah pemerintahan SBY, Indonesia cenderung menggunakan orientasi *outward looking* sebagai acuan dalam keterlibatan internasional sebagai prioritas utama kebijakan luar negeri Indonesia. Menambah teman dan mengurangi musuh atau yang dikenal dengan prinsip *one thousand friends zero enemy* merupakan prioritas yang diterapkan, terlebih pada masa itu pemerintah berusaha menggunakan pendekatan non kekerasan. SBY telah mencoba untuk meningkatkan peran Indonesia di tingkat regional dan global. Dia mengarahkan kebijakan luar negeri Indonesia ke orientasi luar berdasarkan nilai-nilai demokrasi.

Didasari oleh peningkatan ekonomi dan kemajuan militer China di kawasan Asia Timur sebagai *new emerging power* dan kehadiran Amerika Serikat (AS) sebagai negara adi kuasa di Laut China Selatan (LCS). Bagi Indonesia, kemajuan ekonomi China merupakan peluang, tapi kehadiran AS dan agresifitas militer China merupakan ancaman bagi proses pembentukan arsitektur kawasan yang mengarah pada konflik terbuka di LCS. Dalam rangka merespon kecenderungan konflikual di kawasan karena hadirnya dua kekuatan baru, Marty menggagas konsep yang dinamakan *Dynamic Equilibrium*. Doktrin Natalegawa resmi digunakan oleh Indonesia sejak tahun 2011 sebagaimana tersurat dalam pidato pernyataan tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia(Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2011).

Menteri luar nergeri SBY, Marty Natalegawa mengeluarkan doktrin kebijakan luar negeri yang disebut *dynamic equilibrium*. Doktrin *dynamic equilibrium* dapat dikatakan sebagai prinsip bebas aktif yang diangkat ke level kawasan. Marty Natalegawa sendiri mengartikan “*Dynamic Equilibrium*”

sebagai sebuah keselarasan dalam bekerjasama antar negara yang berinteraksi secara damai dan menciptakan rasa saling menguntungkan tanpa hadirnya sebuah kekuatan dominan tunggal di kawasan(Sutiono, Mahroza, & Yusciantoro, 2019).

Dynamic equilibrium merupakan kondisi di mana tidak ada kekuatan dominan tunggal di kawasan bukan karena blok politik, namun lebih diakibatkan jenis hubungan internasional baru dengan penekanan pada keamanan bersama, kemakmuran bersama, dan stabilitas bersama(STATEMENT BY H.E. DR. R. M. MARTY M. NATALEGAWA MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS REPUBLIC OF INDONESIA, 2011). Sebagai doktrin kebijakan luar negeri Indonesia di abad 21, doktrin ini tidak mengizinkan AS dan China untuk melakukan perimbangan kekuatan dengan langkah tradisional atau militer, namun melalui serangkaian mekanisme yang dipimpin regional. Implementasi dari gagasan *dynamic equilibrium* adalah pembentukan dan pemeliharaan sistem yang membangun kepercayaan dan norma-norma antar negara(Poling, 2013).

Doktrin Natalegawa “*Dynamic Equilibrium*” merujuk kepada hubungan antar negara yang mengutamakan kemitraan dan berlandaskan keyakinan bahwa akan terwujudnya tatanan internasional yang bersifat *win-win solution*, bukan *zero-sum*. Misalnya, beberapa institusi yang memperluas keanggotaan ASEAN seperti EAS, ADMM+ dan ASEAN Maritime Forum (AMF) serta hubungan bilateral dan trilateral yang berlangsung di kawasan(Poling, 2013). Melalui kerangka kerja sama yang merupakan salah satu dari doktrin Natalegawa “*Dynamic Equilibrium*” ini, Indonesia dapat menjalankan kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Tidak berpihak pada salah satu kekuatan yang dominan atau strategis, dan akan memberikan rasa aman serta kebebasan pada negara-negara yang ingin melakukan kerjasama.

Selain itu juga bertujuan kekuatan besar untuk berpartisipasi dalam kerangka kerjasama membangun konstruksi kawasan yang inklusif.

Setidaknya dalam doktrin Natalegawa “*Dynamic Equilibrium*” ini mencakup beberapa hal, pertama tidak ada suatu negara dominan di sebuah kawasan. Kedua Indonesia mengedepankan sikap netralitas atau tidak memihak. Ketiga berperan sebagai pencari keseimbangan atau mediator dalam menyelesaikan sebuah konflik. Keempat mengikat kekuatan-kekuatan besar global untuk berkontribusi bagi stabilitas dan pembangunan di sebuah kawasan. Kelima menciptakan kawasan regional yang solid dengan mengacu pada keseimbangan dinamis yang bermakna di seluruh kawasan.

Keenam mengutamakan jalur diplomasi damai dan pendekatan dialog untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik. Lalu meningkatkan kerja sama antar negara. Kemudian menumbuhkan rasa saling percaya antar negara-negara yang berkonflik dan mencarikan solusi menguntungkan alias *win-win solution* bagi pihak-pihak yang terlibat konflik.

Perkembangan wilayah yang terus diperhatikan oleh Indonesia menghasilkan teretusnya sebuah gagasan. Indonesia pertama kali mengungkapkan perspektifnya terhadap Indo-Pasifik pada 16 Mei 2013 ketika Menlu Marty Natalegawa berpidato di hadapan konferensi yang diselenggarakan Center for Strategic and International Studies di Washington D.C(Purnama, 2017). Usulan tersebut menyerukan “*Indo-Pacific Treaty of Friendship and cooperation*”(Ram, 2015). Dalam pidatonya beliau menguraikan "Perspektif Indonesia tentang Indo-Pasifik." Memperhatikan bahwa di masa lalu identitas politik dan ekonomi regional Pasifik dan Hindia dapat dipertimbangkan secara terpisah, namun beliau berpendapat bahwa masa depan dapat memiliki arsitektur internasional baru yang menghubungkan keduanya ke dalam kerangka Indo-Pasifik.

Dalam kesempatan itu, Natalegawa menyatakan bahwa bagi Indonesia yang secara geografis terletak di kawasan Indo-Pasifik, masa depan arah kawasan Indo-Pasifik menjadi kepentingan Indonesia. Perjanjian Indo-Pasifik dianggap sejalan dengan *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) yang diselenggarakan oleh ASEAN. Sehingga beliau mempertimbangkan untuk membuat perjanjian yang sejalan dengan norma-norma dan aturan-aturan atau keterlibatan yang telah terjadi melalui ASEAN dan entitas-entitas afiliasinya(Ram, 2015).

Natalegawa menjelaskan tiga tantangan yang dihadapi di kawasan Indo-Pasifik untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di antaranya(Natalegawa, 2013). Pertama, adanya *trust-deficit* atau defisit kepercayaan antar negara-negara, beliau mengambil contoh kasus yang ada di Semenanjung Korea. Dimana di wilayah tersebut terjadi penajaman ketidakpercayaan dan siklus ketegangan yang tinggi hal tersebut salah satunya didasari kepemilikan kemampuan nuklir oleh Korea Utara. Diperlukan cara-cara yang bisa mengacaukan desakan yang sering tanpa henti terhadap konflik. Hal itu ditujukan untuk mengakhiri rasa keniscayaan konflik. Sifat saling percaya antar negara harus dibangun dan dipupuk. Dibutuhkan kemampuan untuk saling menahan diri agar tidak berujung konflik.Oleh karena itu perlu dibentuk komunikasi formal maupun jnformalyang dilakukan oleh pemerintah dan non-pemerintah. Sehingga untuk mencapai perdamaian dan stabilitas Indo-Pasifik membutuhkan modalitas untuk membangun rasa saling percaya dan percaya diri. Mengganti siklus ketegangan yang terlalu sering dengan lingkaran kepercayaan dan pembangunan kepercayaan yang baik.

Kedua, masih adanya klaim teritorial yang belum diselesaikan. Klaim teritorial yang belum terselesaikan, bahkan perselisihan, tidak harus disamakan atau menjadi sebuah konflik. Negosiasi yang berlangsung berabad-

abad dan tidak jarang prosesnya melelahkan. Beban selanjutnya yaitu masalah hukum dan teknis yang kompleks, ini merupakan masa lalu dan harus diperbaiki. Indo-Pasifik membutuhkan komitmen dari pihak-pihak yang bersengketa untuk menghormati kode perilaku atau perilaku tertentu di wilayah yang terkena dampak. Sebagai contoh dalam konteks Laut Cina Selatan, ini berarti penyusunan kode etik regional antara ASEAN dan Cina. Diperlukan tindakan yang tepat taat hukum dan pendalaman komunikasi formal atau informal. Selalu berusaha untuk menghindari kesalahan perhitungan atau hal yang tidak diinginkan. Sehingga diperlukan komitmen dari pihak yang bersengketa untuk menghormati *code of conduct*. Namun, pada akhirnya, di mana perselisihan wilayah terjadi, negara dalam kawasan Indo-Pasifik harus berkomitmen untuk penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ketiga, mengelola dampak perubahan yang ada pada wilayah Indo-Pasifik. Perubahan dan transformasi di dalam negara pada bidang politik dan ekonomi pasti memiliki konsekuensi. Faktanya, kawasan Indo-Pasifik telah menyaksikan beberapa proses perubahan paling mendasar dalam beberapa dekade terakhir. Reformasi dan perubahan demokratis telah maju sebagai contoh misalnya Asia Tenggara secara kolektif, melalui membentuk Komunitas Politik-Keamanan ASEAN. Menjadikan demokrasi dan mereformasi aspek-aspek merupakan kunci pembangunan komunitas. Selain perubahan politik yang sama-sama berdampak adalah transformasi ekonomi di kawasan Indo-Pasifik, mengubah ekonomi kawasan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi global. Ketika perubahan terjadi, jenis tantangan baru akan muncul. Intinya, wilayah tersebut akan menyaksikan hubungan antar negara yang ditandai oleh kompetisi atau kemitraan. Guna melawan tantangan tersebut kawasan Indo-Pasifik memerlukan paradigma baru hubungan antar negara melalui proses *community-building*. Tetap beliau menekankan bahwa

perspektif segar untuk kawasan Indo-Pasifik memerlukan satu langkah signifikan yakni mempromosikan “*Dynamic Equilibrium*”.

4.2.3 Doktrin “Poros Maritim Dunia”

Doktrin Poros Maritim Dunia dapat dikatakan sebagai lanjutan dari penerapan *Dynamic Equilibrium* atau sebagai strategi nyata dalam merealisasikan *Dynamic Equilibrium*. Indonesia merupakan negara berlokasi strategis karena berada tepat di tengah atau jalur silang antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan melihat pergeseran kawasan atau lingkungan tersebut dirasa penting untuk membangun Indonesia menjadi negara Poros Maritim Dunia. Sehingga pada subbab ini penulis akan berfokus terhadap Poros Maritim Dunia merupakan agenda domestik yang beriringan dengan pengusulan *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIP)

Setelah berakhirnya masa pemerintahan SBY, Indonesia tetap melanjutkan visinya sebagai kekuatan di Indo-Pasifik pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Diperkenalkan pada saat kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2014, Poros Maritim Dunia (PMD) merupakan salah satu “senjata” andalan yang digunakan oleh pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla (JK) (Yakti & Susanto, 2011). Mulanya ide mengenai PMD diutarakan oleh dua akademisi di balik tim pemenang Jokowi-JK pada 2014 lalu. Mereka Adalah Rizal Sukma, direktur CSIS dan Andi Widjajanto pengamat pertahanan, mereka memperkenalkan gagasan kemaritiman sebagai distingsi yang tidak ditawarkan oleh pasangan calon (paslon) nomor satu.

PMD didasari oleh kesadaran Indonesia akan terjadinya pergeseran pusat gravitasi geoekonomi dunia ke arah timur. Melihat kondisi geografis Indonesia yang berada di antara benua Asia dan Australia, Samudera Pasifik dan Hindia, serta kawasan Asia Tenggara. Selain itu Indonesia sebagai Negara di “pertengahan” jalan memiliki 4 di antara 10 lokasi paling strategis dunia,

yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makasar(INKINDO DKI Jakarta, 2016). Keempat lokasi ini berpotensi untuk menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan, dan maritim dunia. Oleh sebab itu Indonesia berpotensi besar menjadi Poros Maritim Dunia.

Dalam dinamika itu, laut akan semakin penting artinya bagi masa depan kita. Jalur laut yang menghubungkan dua samudra strategis (Hindia dan Pasifik) merupakan jalur penting bagi lalu lintas perdagangan dunia. Tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan “lorong” lalu lintas maritim dunia. Dua samudra strategis itu juga menyimpan kekayaan besar (energi dan sumber daya laut lainnya) yang akan menentukan masa depan kemakmuran di kawasan(Diposaptono, 2017).

Apresiasi terhadap pentingnya geografi maritim Indonesia sebenarnya bukan merupakan hal yang baru dalam merumuskan pemikiran strategis negara. Upaya pertama yang dilakukan Indonesia untuk mengartikulasikan kebijakan strategis dalam geografi maritim adalah melalui Deklarasi Djuanda 1957(Darmastuti & Subekti, 2015). Setelah hampir 25 tahun diperjuangkan dalam forum internasional secara gigih, barulah pada 10 Desember 1982 UNCLOS (*United Nation Convention on the Law of the Sea*) mengakui dan bahkan mengadopsi konsepsi itu sebagai *The Archipelagic Nation Concept*(Portal Informasi Indonesia, 2019). Hal ini merupakan awal kelahiran Wawasan Nusantara atau doktrin kepulauan Indonesia, yang menjadi dasar pemikiran geopolitik negara. Konsepsi Poros Maritim Dunia sebagai strategi maritim Indonesia sejatinya merupakan kesinambungan dari gagasan masa lalu, dan sekaligus sebagai upaya strategis untuk memaksimalkan seluruh potensi Indonesia.

Gambar 4.2.3.1 Presiden RI Joko Widodo memaparkan visi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur di Myanmar, 13 November 2014.



Sumber: https://kcp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/sbdn/Membangun_Poros_Maritim.pdf

Pada hari Kamis, 13 November 2014 di forum Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur (East Asia Summit) di Naypyidaw Myanmar, Presiden Jokowi menyampaikan konsep sektorkelautan yang disebut sebagai Poros Maritim Dunia (PMD)(Witular, 2014). Mempromosikan konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dapat dimengerti sebagai doktrin pembangunan menyeluruh guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan di Indonesia melalui pengembangan ekonomi dari domain maritim. Pada dasarnya, komponen geopolitik dalam agenda pembangunan ini, merupakan panggilan

untuk konseptualisasi dari kepentingan vital Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada pada posisi strategis, di persimpangan kepentingan kekuatan utama di Indo-Pasifik(Darmastuti & Subekti, 2015).

Menurutnya, sebuah transformasi besar sedang terjadi pada abad ke-21 ini. Pusat gravitasi, geoekonomi, dan geopolitik dunia sedang bergeser dari Barat ke Asia Timur. Negara-negara di wilayah Asia sedang bangkit. Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 % per tahun dan total GDP sekitar US\$ 40 triliun, Asia Timur merupakan kawasan paling dinamis secara ekonomi. Sekitar 40 persen perdagangan dunia ada di kawasan ini(Diposaptono, 2017).

Untuk merealisasikan ambisinya sebagai poros maritim, terdapat lima pilar utama yang perlu dilakukan Indonesia(Portal Informasi Indonesia, 2019). Pertama ialah Budaya maritim, Indonesia perlu membangun kembali budaya maritim melalui redefinisi identitas nasional Indonesia sebagai sebuah negara maritim. Indonesia melihat Lingkungan strategis dengan mempertimbangkan faktor internal atau domestik. Sebagai negara yang terdiri lebih dari 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudra.

Kedua Ekonomi maritim, mengelola dan sekaligus melestarikan sumber daya maritim bangsa dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut. Dari pilar ini Indonesia mencoba melihat potensi geoekonomi yang dimiliki Indonesia. Sehingga aspek ini sangat penting bagi keberlangsungan negara pada lingkungan atau kawasan. beberapa langkah pengembangannya seperti melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kekayaan maritim ini akan digunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan rakyat.

Ketiga Konektivitas maritim, sadar dengan bentuk geografis negara yang dipersatukan oleh perairan menghasilkan sebuah kewajiban untuk mempermudah akses-akses antar wilayah. Pilar ini memprioritaskan pembangunan serta pengembangan infrastruktur maritim, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan pariwisata laut. Seperti membangun tol laut, *deep seaport*, logistik, industri perkapalan, serta pariwisata bahari.

Keempat Diplomasi maritim, memaksimalkan langkah *soft power* dalam menangani ancaman regional dan peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral di bidang maritim. Sehingga mengupayakan untuk mengajak semua mitra Indonesia bekerja sama pada bidang maritim. Secara bersama-sama kita harus menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Laut harus menyatukan, bukan memisahkan kita semua.

Terakhir Keamanan maritim, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudra, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Diperlukan mempersiapkan *hard power* untuk memperkuat kekuatan pertahanan maritim Indonesia dalam usaha pengamanan wilayah Indonesia. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Dari lima pilar tersebut menafsirkan banyak sekali yang ingin Indonesia wujudkan. Menurut Ketua Umum DPN Inkindo, Ir. Nugroho Pudji Rahardjo, pembangunan Poros Maritim sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia berperan penting dalam dalam sistem global, dalam lingkup internasional, regional Asia Pasifik dan ASEAN(INKINDO DKI Jakarta, 2016). Diantarnya menurut beliau yaitu sebagai Pusat kegiatan maritim dunia, Pusat kegiatan industri dunia, Pusat perdagangan dunia, Negara industri perikanan terkemuka di dunia, Negara tujuan wisata kelautan terkemuka di

dunia, Negara pengguna energy hijau berbasis kelautan terkemuka di dunia, Negara yang memiliki sistem kota-kota internasional, Negara yang memiliki sistem pertahanan, keamanan dan keselamatan (sipil) di laut, Negara yang berperan penting dalam menjaga ketertiban dan kedamaian dunia.

Poros Maritim Dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, dan kuat. Kemudian mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan ataupun dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Posisi sebagai Poros Maritim Dunia membuka peluang bagi Indonesia untuk membangun kerja sama regional dan internasional bagi kemakmuran rakyat. Kerja sama tersebut dilandasi oleh kesepahaman bersama sehingga menghasilkan solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*) di antara pihak yang terlibat. Cita-cita dan agenda tersebut harus menjadi fokus Indonesia di abad ke-21. Indonesia berusaha untuk bisa menjadi Poros Maritim Dunia, menjadi kekuatan yang mengarungi dua samudra, sebagai bangsa maritim yang sejahtera dan berwibawa.

4.3 Strategi Indonesia Mewujudkan *ASEAN Outlook On Indo-Pacific (Aoip)*

Dari ulasan di atas dengan melihat keadaan lingkungan kawasan, dapat ditarik kesamaan bahwa kelima kekuatan besar yakni AS, China, India, Jepang dan Australia berupaya untuk mengamankan rute pelayaran, akses ke pasar, dan akses ke sumber daya di kawasan Indo-Pasifik (Yani & Montratama, 2015). Indonesia tepat berada di tengah-tengah Indo-Pasifik yang harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kebesaran bangsa Indonesia. Terdapat asumsi saat ini China dalam situasi berhadapan dengan AS, India, Jepang dan Australia.

Indonesia memiliki peran strategis dalam memastikan persatuan ASEAN dengan penekanan terhadap statusnya sebagai kekuatan menengah.

Dewi Fortuna menyebut bahwa pemerintah Indonesia memiliki peran yang

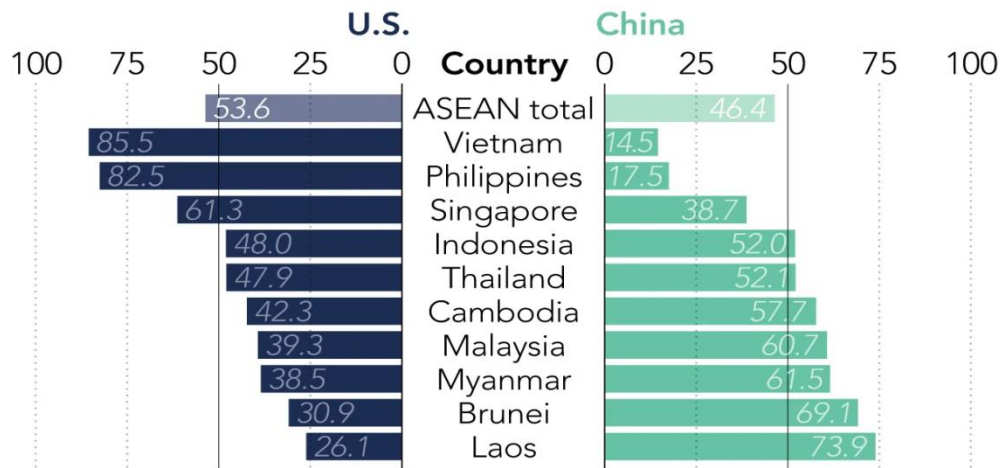
signifikan dalam mengonsep *ASEAN outlook on the Indo-Pacific* karena tiga alasan (IDN Financials, 2020). Pertama memperkokoh status Indonesia sebagai pimpinan tidak resmi ASEAN serta kekuatan menengah global. Kemudian yang kedua, inisiatif tersebut juga untuk menjaga sentralitas ASEAN. Lalu ketiga memberi kendali kepada asosiasi tersebut untuk mengelola keamanan regional dan tantangan ekonomi. Dengan begitu Indonesia dapat merealisasikan kepentingannya melalui ASEAN, yakni membangun kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang dianggap menurun, kemudian memastikan keutuhan dan sentralitas ASEAN, serta menciptakan kondisi yang stabil sehingga agenda PMD Indonesia dapat berjalan dengan baik.

Dengan posisi saat ini Indonesia menghadapi persaingan antara kedua kekuatan besar yang tidak mudah. Di satu sisi, Indonesia ingin terus menjaga hubungan positif dengan China, terutama karena Indonesia mendapatkan investasi dari China untuk memperbaiki infrastruktur dan juga memperkuat industri domestik yang bisa membuka lapangan kerja. Di sisi lain, Indonesia pun sadar bahwa China bisa berpotensi besar untuk menciptakan instabilitas di Asia Tenggara, terutama sebagai pengancam persatuan ASEAN. Hal ini terlihat dalam KTT ASEAN di Kamboja di tahun 2012, dimana dalam pertemuan tersebut, Kamboja, atas desakan China, menolak usul Filipina untuk memasukkan isu Laut Cina Selatan ke dalam Joint Communique ASEAN (Kozlovski & Penh, 2012). Walaupun pada akhirnya kesatuan ASEAN bisa dipertahankan, namun terlihat bahwa pengaruh China tak bisa dianggap remeh.

Gambar 4.3.1 Survey perpecahan ASEAN

Survey finds Southeast Asians split between U.S. and China

If ASEAN were forced to align itself with one of the two strategic rivals, which should it choose? (in percent)



Online survey of about 1,300 respondents in Southeast Asia conducted between Nov. 12 and Dec. 1
Source: ISEAS-Yusof Ishak Institute

Sumber: <https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/7-of-10-ASEAN-members-favor-China-over-US-survey>

Isu gonjang-ganjing dalam tubuh ASEAN tidak berhenti sampai disitu. Menurut tulisan Kentaro Iwamoto⁷ dari 10 anggota ASEAN lebih menyukai Cina daripada AS (Iwamoto, 2020). Ketika persaingan antara AS dan China terus memanas, orang-orang Asia Tenggara terpecah di antara dua negara adidaya. Dalam survei State of Southeast Asia 2020 oleh ISEAS-Yusof Ishak Institute, 73% dari 1.308 pakar dari negara-negara anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara mengatakan kawasan itu menjadi tempat pementasan untuk perebutan kekuasaan besar, dan bahwa anggota ASEAN dapat menjadi proksi untuk satu sisi atau yang lain.

China menjadi pilihan oleh mayoritas responden yakni tujuh dari 10 negara ASEAN, dengan 69% dari Brunei mendukung negara itu, 58% dari Kamboja, 52% dari Indonesia, 74% dari Laos, 61% dari Malaysia, 62% dari Malaysia Myanmar dan 52% dari Thailand. AS adalah pilihan luar biasa di antara responden dari Filipina dan Vietnam masing-masing sebesar 83% dan 86%, diikuti oleh 61% dari Singapura (Iwamoto, 2020). Dukungan kuat yang ditunjukkan oleh responden Filipina dan Vietnam muncul sebagian karena pertengkaran laut yang sedang terjadi di negara mereka dengan Beijing di Laut China Selatan.

Kemudian menurut Muhamad Habib, salah satu Asisten Peneliti Di Departemen Hubungan Internasional CSIS, menurutnya “jika dilihat sekarang mungkin memang keliatan ada jarak antara mainland daratan ASEAN itu seperti Kamboja, Laos, Myanmar itu yang lebih dekat dengan China dibandingkan dekat dengan AS. Dibandingkan misalnya negara-negara maritim ASEAN misalnya Singapura, Filipina, Vietnam, Indonesia yang memang juga relative lebih dekat dengan AS. Tetapi bukan berarti kemudian kita berpihak kepada salah satu negara berkekuatan besar ini” (Habib, 2019). Lalu menurut Ibu Rahmawati, Kepala Bidang Kerja Sama ASEAN, Kerja Sama Intrakawasan dan Kerja Sama Antarkawasan Kementerian Luar Negeri mengatakan “memang secara bilateral beberapa negara itu kan memang ada kecenderungan lebih dekat dengan negara lain. Negara-negara Indo-Cina pasti lebih dekat dengan tetangganya yaitu China. Mungkin negara kayak Filipina sama Singapura mungkin lebih dekat dengan AS. *That’s way* kita Indonesia dengan politik Bebas-Aktif kita gamau seperti itu ASEAN” (Rahmawati, 2019).

Dengan tersirat terbentuknya skema “peta politik” atau “kecenderungan kedekatan” antar negara tersebut nampaknya cukup membahayakan bagi keberlangsungan ASEAN. Isu perpecahan tersebut tidak

bisa di sepelekan, ASEAN harus kembali menguatkan kesatuan antar negara. Hal ini lah yang memacu Indonesia untuk mendorong ASEAN membentuk Konsep sendiri untuk Indo-Pasifik. ASEAN tidak boleh lebih jauh lagi dipengaruhi oleh rivalitas dua negara *Great Power* tersebut. Secara lingkungan yang begitu bersaing Indonesia tidak bisa bekerja sendiri, oleh karenanya Indonesia harus memaksimalkan ASEAN guna mencapai kepentingan dan kebaikan bersama.

4.3.1 ASEAN sebagai Ujung Tombak Kepentingan Indonesia

Sebagai institusi yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, ASEAN sangat penting sebagai penyambung kebijakan luar negeri Indonesia. Sebaliknya, Indonesia juga memiliki peranan penting dalam perencanaan arah perkembangan ASEAN. Sejak didirikan tahun 1967, ASEAN telah menjadi “sokoguru” dari kebijakan luar negeri Indonesia. Sebagai salah satu negara pendiri ASEAN, Indonesia telah dikenal luas memiliki peran kepemimpinan dalam perencanaan didalam tubuh institusi ASEAN. Terlebih lagi secara geopolitik kawasan Asia Tenggara terletak pada jantung kawasan Indo-Pasifik, sehingga ASEAN menjadi unsur penting dalam visi Indo-Pasifik Indonesia. Walaupun saat ini kepemimpinan Indonesia sedang dipertanyakan karena kurang terlihat.

ASEAN sangat penting bagi Indonesia, sehingga banyak kebijakan luar negeri Indonesia yang diimplementasikan di tingkat kawasan, khususnya dalam konteks ASEAN. Dewi Fortuna Anwar setidaknya melihat terdapat enam fungsi utama ASEAN untuk Indonesia yang akan memastikan ASEAN tetap menjadi prioritas bagi Indonesia (Anwar, 1994). Fungsi ASEAN bagi Indonesia tersebut secara ringkas di antaranya yang pertama membantu mengembalikan dan mempertahankan kredibilitas Indonesia di kancah internasional dan regional, ASEAN menjadi bagian kontributor atas nama

baik Indonesia di dunia luar. Kedua, menciptakan kawasan yang harmonis, ASEAN sebagai kontributor keharmonisan regional.

Ketiga ASEAN sebagai penyangga terhadap serangan eksternal dan subversi, menjadi penyangga keamanan bagi Indonesia. Keempat ASEAN sebagai kendaraan untuk tatanan regional yang lebih otonom, karena berkontribusi dalam membangun tatanan regional yang mandiri. Kelima ASEAN sebagai alat perundingan internasional dalam hubungan pembentuk dengan negara-negara yang lebih kuat di luar kawasan. Keenam ASEAN meningkatkan status internasional Indonesia, Meningkatkan postur internasional Indonesia di kawasan dan luar kawasan. Sehingga ASEAN tetap relevan sebagai langkah Indonesia meraih sebuah kepentingan.

4.3.2 ASEAN Outlook On Indo-Pacific (AOIP)

Dengan melihat faktor tersebut Indonesia yang menyadari pergeseran kondisi kawasan harus mengambil langkah yang tepat. Indonesia perlu mengajak ASEAN guna menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Konsep komunitas keamanan terdiri dari tiga elemen kunci, menurut Adler dan Barnett. Pertama, anggota komunitas keamanan telah berbagi identitas, nilai, dan makna. Kedua, mereka memiliki hubungan banyak sisi dan langsung. Ketiga, mereka memiliki minat jangka panjang yang sama. Ini dapat menjadi dasar untuk Indonesia menggunakan ASEAN sebagai penggerak yang kuat.

Ide Indonesia mengusulkan pembentukan pandangan ASEAN terhadap kawasan Indo-Pasifik merupakan usulan yang baik guna menjaga sentralitas ASEAN. Dalam konteks *Security Community*, pembentukan norma dan identitas pada ASEAN justru sudah memiliki basis yang dapat dikembangkan. Prinsip-prinsip kedaulatan dan non-interferensi yang selama ini banyak dianggap sebagai halangan bagi integrasi Asia Tenggara justru sebenarnya adalah modalitas semakin memperkuat nilai, identitas dan norma-norma. ASEAN berjalan di bawah prinsip yang disebut “ASEAN Way” yang

berarti menghormati kedaulatan nasional, non-intervensi, dan penyelesaian masalah melalui cara damai. Oleh karenanya identitas yang sudah terbangun penting menjadi penyangga utama organisasi. Meskipun hubungan kausalitas antara prinsip-prinsip tersebut dengan stabilitas ASEAN, tentu mengharuskan kajian lebih dalam lagi dan tetap banyak yang di perbaiki. Kemudian elemen kunci yakni memiliki hubungan banyak sisi dan langsung. Jelas hubungan antar negara asia tenggara ini sangat banyak, dari yang secara bilateral hingga multilateral. Waktu pelaksanaan yang didasari minat jangka panjang juga sudah terbukti, ASEAN hingga kini sudah 53 tahun dapat berjalan dengan baik.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-34 yang mengusung tema *ASEAN Partnership for Sustainability* telah berlangsung pada 20-23 Juni 2019 lalu di Bangkok, Thailand. Mewakili sekitar kurang lebih 650 juta penduduk ASEAN, sepuluh pemimpin negara-negara anggota ASEAN berkumpul dan menghasilkan beberapa dokumen penting yang hasilnya tidak hanya akan berdampak bagi ASEAN, tetapi dapat juga menimbulkan pengaruh besar bagi negara-negara tetangga di kawasan. Salah satu dokumen penting yang dihasilkan dan cukup mendapat perhatian masyarakat internasional adalah disepakatinya *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific/ AOIP* (Pandangan Bersama ASEAN tentang konsep IndoPasifik)(Roza, 2019).

Dokumen ini merupakan pandangan resmi pertama ASEAN yang disampaikan kepada publik mengenai konsep Indo-Pasifik di tengah menguatnya persaingan kekuatan-kekuatan besar di kawasan ini. Banyak pihak melihat AOIP akan memberi pengaruh signifikan bagi perkembangan ASEAN di masa yang akan datang. Penting bagi Indonesia, untuk lebih jauh memahami arti penting AOIP karena Indonesia sendiri merupakan negara pengusul lahirnya dokumen ini. Pemerintah Indonesia berhasil memperoleh dukungan dan kontribusi dari semua negara anggota ASEAN.

Lahirnya dokumen tersebut dilakukan Indonesia dengan melakukan serangkaian strategi dan proses. Bermula dengan instruksi Menteri Luar Negeri pada saat Rakor Keppri bulan Februari 2018, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) disertai tugas untuk mengembangkan Konsep Indo-Pacific. BPPK pada tahun 2018 melakukan kajian Diplomasi Maritim, Polkam dan Perbatasan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi Pimpinan Kementerian Luar Negeri dan bahan penyusunan dokumen posisi delegasi Indonesia di dunia internasional. Selain menjadi rekomendasi kebijakan bagi Pimpinan Kementerian Luar Negeri, hasil kajian juga disebarluaskan kepada masyarakat, melalui penerbitan naskah / artikel di berbagai media berbahasa asing. BPPK juga aktif melaksanakan diskursus mengenai kebijakan dan posisi Indonesia, khususnya di bidang maritim, polkam dan perbatasan di berbagai fora internasional (Kementerian Luar Negeri, 2019).

Tugas BPPK, sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, adalah menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan kebijakan di bidang luar negeri (Kementerian Luar Negeri, 2020). Dalam pelaksanaan tugas tersebut, BPPK menyelenggarakan fungsi sebagai Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri. Pelaksanaan administrasi Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Selain itu, guna memberikan pemahaman yang sama atas strategi Indonesia terhadap Indo-Pasifik, dinamika strategi Indonesia di tengah strategi Indo-Pasifik yang diusung negara-negara lain, serta progress dari pemajuan dan penajaman strategi Indonesia. BPPK telah menyiapkan beberapa Briefing Note Khusus terkait terkait konsep Indo Pasifik yang telah

berkembang pada tahun 2018. Diantaranya adalah Briefing Note Indo Pasifik dalam Perspektif Indonesia: “Poros Maritim dan ASEAN-led” Januari 2018 dan Briefing Note “Penggunaan Nama Indo-Asia sebagai Alternatif bagi Terminologi Indo-Pacific”(Kementerian Luar Negeri, 2019)

Kendala dalam kerja sama ASEAN adalah adanya perbedaan persepsi dan prioritas di antara Negara Anggota ASEAN. Perbedaan ini masih sangat dirasakan pada tahun 2018 dimana terdapat kontestasi kepentingan masing-masing negara anggota dengan bayang-bayang pengaruh negara-negara besar terhadap isu-isu strategis di ASEAN(Kementerian Luar Negeri, 2019). Bahkan menteri luar negeri, Retno Marsudi menyadari banyak negara ASEAN yang tidak berminat ketika Indonesia menggulirkan konsep tersebut. Penolakan negara-negara itu dipengaruhi oleh poros politik beberapa negara ASEAN yang berkiblat antara China atau Amerika(Ramadhanty, 2019). Tetapi Indonesia berusaha menjelaskan bahwa konsep ini diusulkan untuk meningkatkan sentralitas ASEAN di kawasan serta mengoptimalkan kerja sama yang telah ada tanpa mengubah arsitektur kawasan.

Menurut kepala BPPK, Dr. Siswo Pramono(Pramono, 2018), Indonesia melakukan diplomasi untuk meyakinkan kepada negara-negara di ASEAN bahwa Indonesia tidak akan meninggalkan ASEAN. Indonesia mengajak ASEAN untuk bersama-sama membangun sebuah konsep bersama Indo-Pasifik. ASEAN harus membuat konsep dari ASEAN dan berdasarkan mekanisme ASEAN yang ada pada “ASEAN Way” dan TAC. Dalam menyelaraskan pandangan bersama terkait konsep dari Indonesia yakni dengan cara mengundang semua negara ASEAN dalam wadah EAS, kemudian berikan yang negara lain punya. Sehingga diketahui apa yang diperjuangkan masing-masing negara. Tetapi, diantara perbedaan tersebut pasti ada poin yang dapat disatukan sehingga dapat menjadi titik kerjasama yang akan menyejahterakan bersama. Jadi diplomasi yang dilakukan oleh

Indonesia yang di lakukan oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Luar negeri Retno Marsudi, jajajarn BPPK dan Aspasaf yakni membangun rasa saling percaya pada seluruh anggota ASEAN. Setelah melalui berbagai konsultasi yang intensif dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga kajian, K/L, dan perwakilan RI di luar negeri (melalui *Video Conference*), akhirnya berhasil dirumuskan suatu dokumen dengan judul “*Indonesia’s Perspective for an ASEAN Outlook on Indo-Pacific: Towards a Peaceful, Prosperous, and Inclusive Region*”(Kementerian Luar Negeri, 2019).

KTT ke-32 ASEAN dilaksanakan pada 27-28 April 2018 dan dihadiri oleh para kepala negara/kepala pemerintahan negara-negara anggota ASEAN termasuk Presiden RI Jokowi (Redaksi WE Online, 2018). Presiden RI secara resmi menyampaikan prakarsa Indonesia terkait konsep kerja sama Indo - Pasifik yang dikembangkan untuk menjaga relevansi ASEAN dan menjami sentralitas dan kepemimpinan ASEAN di kawasan. ASEAN harus terus dapat memainkan perannya termasuk dalam pengembangan konsep kerja sama Indo-Pasifik. Konsep Indo-Pasifik ASEAN penting sekali artinya agar ASEAN tetap relevan, kemudian senantiasa memainkan sentralitasnya dan menunjukkan kemampuan ASEAN dalam mengelola pergeseran lingkungan strategis. Adapun Indonesia, untuk mewujudkan kerja sama Indo-Pasifik Presiden Jokowi mengusulkan tiga upaya ASEAN ke depan (Santi, 2018). Pertama, ASEAN harus mampu menjadi motor bagi penciptaan *enabling environment*. Kedua, ASEAN harus dapat mendayagunakan berbagai modalitas untuk menanggulangi tantangan keamanan, termasuk transnational crimes. Ketiga, ASEAN harus pro-aktif dalam menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, khususnya di Samudera Hindia.

ASEAN Foreign Ministers’ Meeting Singapura 30 Juli – 4 Agustus 2018. Menlu RI menyampaikan prakarsa konsep kerja sama Indo-Pasifik yang bertujuan untuk mempertahankan sentralitas ASEAN dalam menghadapi

berbagai tantangan di kawasan. Dalam forum tersebut dicatat pengarahannya tentang konsep Indo-Pasifik Indonesia. Sehingga forum menantikan diskusi lebih lanjut tentang konsep Indo-Pasifik, yang menganut prinsip-prinsip utama seperti *ASEAN Centrality*, keterbukaan, transparansi, inklusivitas, dan pendekatan berbasis aturan, sambil berkontribusi pada rasa saling percaya, saling menghormati dan saling menguntungkan (ASEAN, 2018). Indonesia menyampaikan non-paper "*Indonesia's Perspective on an Indo - Pacific Outlook*". Konsep ini telah dipaparkan oleh Kepala BPPK kepada SOM ASEAN di Singapura, serta secara intensif didiskusikan dengan para SOM Leaders negara-negara East Asia Summit, di Singapura, pada acara *51st ASEAN Foreign Ministers' Meeting and Related Meetings*, tanggal 29 Juli - 2 Agustus 2018 (Kementerian Luar Negeri, 2019).

Concept Paper "Indonesia's Perspective for an ASEAN Outlook on Indo – Pacific: Towards a Peaceful, Prosperous, and Inclusive Region" juga telah dipresentasikan di berbagai fora internasional, antara lain di Canberra-ANU, Colombo Indian Ocean Conference, dan Xiamen. Selanjutnya, BPPK juga telah diundang oleh INDOPACOM di Hawaii pada bulan April dan Mei 2018, serta di Washington, pada bulan Oktober 2018 untuk secara khusus menyampaikan ide-ide utama dari konsep Indonesia mengenai Indo-Pacific, seraya memberi masukan bagi Indo-Pacific strategi pihak Amerika Serikat (Kementerian Luar Negeri, 2019).

Presiden RI Joko Widodo bertolak ke Singapura untuk menghadiri Rangkaian KTT ke-33 ASEAN dan KTT Terkait Lainnya pada tanggal 13-15 November 2018. Dalam berbagai rangkaian pertemuan tersebut, Presiden Jokowi akan memajukan Wawasan Indo-Pasifik dengan ASEAN sebagai pemain utamanya. Wawasan Indo-Pasifik merupakan manifestasi dari visi Indonesia sebagai "Poros Maritim Dunia" dengan memaksimalkan kerja sama di Kawasan Asia Pasifik dan Samudera Hindia (Sekretariat Nasional ASEAN-

Indonesia, 2018). Selama berada di Singapura, Presiden Jokowi akan menghadiri sekitar 17 pertemuan, salah satunya lagi yaitu KTT Asia Timur (*East Asia Summit*). Di wadah tersebut pengenalan konsep Indo-Pasifik yang dilakukan Indonesia di forum KTT Asia Timur (*East Asian Summit*) ke 13. Presiden menjelaskan bahwa Samudera Pasifik dan Samudera Hindia merupakan *single geo-strategic theatre*. Menurut Presiden, Pengembangan kerja sama Indo-Pasifik dilakukan melalui penebalan kerja sama antara negara peserta EAS, dan penting untuk meningkatkan kerja sama dengan mitra lain di Samudera Hindia. Kerja sama Indo-Pasifik dapat difokuskan pada tiga bidang yaitu kerja sama maritim termasuk dalam menanggulangi kejahatan di laut, kerja sama konektivitas untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kerja sama mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk pencapaian target SDGs secara inklusif (Musyaffa, 2018).

ASEAN Foreign Ministers' Retreat on 17-18 January 2019 in Chiang Mai. Agenda ini merupakan pertemuan pertama para Menteri Luar Negeri ASEAN di bawah Kepemimpinan ASEAN Thailand pada tahun 2019 dengan tema "*Advancing Partnership for Sustainability*". Pernyataan pers oleh the Chairman of the ASEAN Foreign Ministers' Retreat Chiang Mai, 17-18 January 2019, salah satunya isinya yakni "Kami mencatat kemajuan musyawarah pendekatan kolektif ASEAN pada Outlook Indo-Pasifik yang memperkuat sentralitas ASEAN dan yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama keterbukaan, transparansi, inklusivitas, pendekatan berbasis aturan, saling percaya, saling menghormati dan saling menguntungkan. Kami percaya bahwa pendekatan semacam itu akan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat di kawasan ini dan melengkapi kerangka kerja sama regional dan sub-regional yang ada. Dalam hal ini, kami menantikan pengembangan Outlook ini lebih lanjut, dengan pandangan untuk menyelesaikannya untuk diadopsi oleh ASEAN." (ASEAN, 2019).

Rangkaian pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-34 ASEAN berlangsung pada 20 – 23 Juni 2019 di Bangkok, Thailand. KTT ASEAN ke-34 dibuka secara resmi oleh Perdana Menteri Thailand, Y.M. Jenderal Prayut Chan-o-cha (KBRI Bangkok, 2019). Thailand selaku Ketua ASEAN pada tahun 2019 ini mengusung tema “*Partnership for Sustainability*” sebagai semangat bersama dalam menyelesaikan berbagai isu di kawasan. Rivalitas kekuatan besar berpotensi mempengaruhi perdamaian dan stabilitas serta upaya pencapaian kemakmuran di kawasan. Saat ini adalah waktu yang tepat bagi Pemimpin ASEAN untuk menyepakati “*ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*” yang mencerminkan kesatuan dan sentralitas ASEAN dalam menjunjung prinsip-prinsip perdamaian, penguatan budaya dialog, dan peningkatan kerja sama (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2019). *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* mengusulkan 4 bidang kerja sama yaitu bidang maritim, konektivitas, pembangunan berkelanjutan dan ekonomi.

Di tingkat regional, Indonesia menyadari adanya *distrust* yang menjadi penghalang terciptanya lingkungan yang kondusif. Dalam suasana seperti ini, Indonesia mengajukan konsep Indo-Pasifik. Indonesia mengharapkan *stabilitas, habit of dialogue*, kerja sama, penghormatan terhadap aturan internasional tetap dijunjung tinggi di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia akan terus mendorong ASEAN untuk memainkan peran sentral (*ASEAN Centrality*) dalam memajukan stabilitas, perdamaian dan kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2020). Dengan komitmen tersebut, Para pemimpin ASEAN telah mengadopsi *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* pada KTT ASEAN di Bangkok, 22 Juni 2019, sebagai pegangan bagi ASEAN untuk melakukan *engagement* di Indo-Pasifik.

Secara sifat diplomasi Indonesia melalui pertemuan-pertemuan ini yaitu diplomasi multilateral. Hal tersebut dikarenakan diplomasi yang dilakukan berurusan dengan beberapa pemerintah secara bersamaan.

Pembentukan AOIP tersebut pun merupakan tujuan dari Proyek Bersama (*Joint projects*) dan secara reaktif (*reactively*) yang dilakukan ASEAN melalui inisiasi Indonesia, hal tersebut didasari bahwa langkah ini dianggap efektif untuk dapat menangani permasalahan bersama dalam tubuh ASEAN terkait sentralitasnya. Kemudian bertujuan mengelola lingkungan eksternal (*Managing the external environment*), dari disepakatinya AOIP yang tadinya pandangan tersebut sebagai acuan ASEAN diharapkan dapat diterapkan sebagai acuan sebagai seluruh aktor yang ada ditingkat global. Selanjutnya membuat kesepakatan yang saling menguntungkan (*Mutually beneficial deals*) bagi semua pihak melalui empat poin yang disepakati dalam AOIP. Serta bertujuan melangsungkan agenda domestik Indonesia dimana sedang membangun sebagai negara PMD.

Langkah diplomasi Indonesia yakni menyiasati kondisi dan dinamika dalam pembahasan isu-isu dalam kerangka ASEAN, melalui pendekatan yang luwes. Selain itu, posisi Indonesia yang jelas terkait perlunya menjaga kesatuan dan sentralitas ASEAN, terutama dalam isu-isu krusial dan melibatkan pihak eksternal, merupakan elaborasi penuh arah Politik Luar Negeri Indonesia yang menempatkan ASEAN sebagai soko guru politik luar negeri Indonesia. Hal ini memberikan penegasan bahwa ASEAN adalah penting bagi Indonesia dan sebaliknya, keamanan dan stabilitas Indonesia yang makmur merupakan jaminan kesejahteraan bagi ASEAN.

Menurut John Lovel setiap negara yang mengembangkan kebijakan luar negeri berusaha menerapkan tipe strategi yang bisa dijelaskan dengan menelaah penilaian para pembuat keputusan tentang strategi lawan dan perkiraan mereka tentang kemampuan sendiri. Lovel telah menyarankan adanya beberapa faktor utama yang memengaruhi proses perumusan strategi kebijakan luar negeri suatu negara-bangsa, yaitu: struktur system internasional, persepsi elit, strategi negara-bangsa lain, dan kapabilitas yang

dimiliki oleh negara tersebut (Yani Y. M., 2010). Keempat faktor ini menentukan corak interaksi antar negara dalam perspektif strategi yang meliputi *leadership strategy*, *confrontation strategy*, *accommodative strategy*, dan *concordance strategy*. Level menyebutnya ini adalah Model Strategik/Model Rasional. Pendapat seperti ini juga disampaikan oleh William D. Coplin, yang disebut model strategi aktor rasional. Perspektif ini merujuk pada (1) *leadership strategy* yang berkaitan dengan upaya menghilangkan kekerasan dalam setiap masalah kebijakan luar negeri, (2) *concordance strategy* mengacu pada upaya saling menguntungkan (3) *accommodation strategy* artinya keseimbangan ketika ada negara yang dominan kapabilitasnya, dan (4) *confrontation strategy* ketika kemampuan suatu negara meningkat dan tidak bisa diimbangi (Fathun, 2019).

Dalam proses untuk mewujudkan konsep yang diusung oleh Indonesia, maka melalui model tersebut pendekatan Indonesia lebih cenderung kolaborasi *leadership strategy* dan *accommodation strategy*. Hal ini merupakan pilihan paling rasional mengingat bahwa pemerintah Indonesia sadar kemampuan, keunggulan serta kondisi di wilayah tersebut. Selama tahun 2018, Indonesia terus berupaya meningkatkan kepemimpinannya di ASEAN. Kepemimpinan Indonesia di ASEAN selalu didasari dari kepentingan nasional. Diplomasi Indonesia dalam rangka kerja sama kemitraan ASEAN merupakan upaya aktif Indonesia dalam mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil, dan damai di berbagai aspek terlebih untuk terus mendukung perwujudan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Sepanjang tahun 2018, dari 132 rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang disampaikan oleh Kemenlu dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri ASEAN, 130 berhasil diterima dengan baik (Kementerian Luar Negeri, 2019). Oleh sebab itu “strategi kepemimpinan Indonesia” dapat menjadi akses Indonesia untuk mengakomodasi negara-negara ASEAN. Indonesia berusaha meyakinkan bahwa ASEAN harus bersatu dan sadar

bahwa pentingnya bersama karena terdapat ancaman yang dapat mengganggu stabilitas regional yakni berasal dari rivalitas *great power*. Langkah akomodasi Indonesia dijalankan melalui diplomasi dan pengiriman delegasi ke forum atau pertemuan formal dan non formal.

Berdasarkan *leadership strategy* dan *accommodation strategy* maka logika berpikirnya adalah *rational choice* dengan basis pendekatan *soft power*. Menggunakan strategi keras atau konfrontasi akan menambah kekacauan dan akan semakin sulit untuk menyatukan negara-negara Asia Tenggara. *Leadership strategy* dan *accommodation strategy* ini dilakukan dengan argumentasi bahwa Indonesia sebagai negara yang memiliki nama baik di ASEAN dan negara yang berprinsip politik bebas-aktif sehingga berusaha untuk mengakomodasi dalam usaha menjaga perdamaian. Karakter yang ditunjukkan yakni Indonesia berusaha memberi konsep tetapi tidak memaksa negara lain untuk boleh berpendapat berbeda dengan Indonesia namun mencari persamaan agar mendapatkan kesepakatan bersama.

Sebagai contoh keberhasilan dari model strategi aktor rasional yakni penerapan strategi kepada Kamboja. Kamboja merupakan salah satu negara pertama di ASEAN yang menyampaikan dukungan terhadap konsep Indo-Pasifik. Pendapat tersebut disampaikan oleh menteri luar negeri Indonesia Retno Marsudi di sela pertemuan tingkat menteri ASEAN (AMM), Singapura, Kamis 2 Agustus 2018 (Indopolitika.com, 2018). Secara psikologis Kamboja percaya kepada konsep Indonesia karena menyadari kepemimpinan Indonesia dalam tubuh ASEAN. Hal tersebut didasari karena Indonesia pernah menyelesaikan berbagai masalah di ASEAN, seperti permasalahan konflik Kamboja-Vietnam, Konflik Kamboja-Thailand. Kemudian Indonesia dapat mengakomodasi kepentingan bersama, sehingga Kamboja tahu bahwa konsep yang dibawa oleh Indonesia adalah konsep yang inklusif yang mengutamakan kerja sama. Lalu pada 4 Desember 2018 Pada pertemuan antara Menteri Luar

Negeri Retno LP Marsudi dengan Menlu Kamboja Prak Sokhonn di Gedung Pancasila, konsep Indo-Pasifik mendapatkan penegasan dukungan (Nugraha, 2018). Baik Menlu Retno dan Menlu Sokhonn sepakat untuk mengintensifkan kerja sama memperkuat persatuan dan sentralitas ASEAN. Keduanya memastikan kawasan Asia Tenggara tetap damai dan makmur.

Dengan melihat urgensi yang terjadi di kawasan, hal tersebut yang menyebabkan Indonesia melakukan strategi berdiplomasi dengan negara sesama Asia Tenggara. Diplomasi dipilih karena kedekatan Indonesia dengan ASEAN yang sudah berlangsung sekitar 53 tahun. Kemudian langkah diplomasi atau *soft power* dirasa lebih baik dibanding harus menggunakan kekerasan atau *hard power*. Melalui diplomasi dapat menggunakan wadah-wadah pertemuan ASEAN sehingga dapat dibahas didalam forum kawasan. Diplomasi juga dipilih karena sesuai dengan nilai-nilai ASEAN dimana menghormati kedaulatan nasional, non-intervensi, dan penyelesaian masalah melalui cara damai.

Selain itu diplomasi Indonesia terhadap negara ASEAN menggunakan pemahaman bahwa sebagai sesama anggota ASEAN memiliki ancaman yang sama yakni *power projection* dari negara *great power*. Sehingga pendekatan melalui kesadaran bahwa kita merupakan negara berkembang atau *midlle power*, merupakan langkah diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia untuk meyakinkan negara-negara ASEAN bahwa kita dapat bersatu untuk menjaga keamanan dan stabilitas kawasan. Indonesia terus berupaya membuktikan diri dengan berperan aktif di berbagai forum, utamanya dengan memanfaatkan ASEAN sebagai “kendaraan diplomasi”. Diplomasi ditempuh dengan cara memilih konsultasi dan konsensus, yang membuat Indonesia mendapatkan kepercayaan ASEAN dan dukungan ASEAN sebagai organisasi yang berpengaruh dalam dunia internasional.